



LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
TAHUN 2007

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOLAANG
MONGONDOW



BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT II
BOLAANG MONGONDOW

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena dengan perkenan-Nya, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 ini dapat tersusun. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan dapat terlaksana dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia.

Menyimak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan potensi, karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah guna menjamin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup Daerah tersebut, maka sangat diperlukan data dan informasi yang menggambarkan suatu analisis tentang kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2007 ini terdiri dari dua Buku yang merupakan kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Guna mewujudkan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu ***Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru, yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing, Maju dan Mandiri.***

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2007 ini, disusun dengan mengacu pada metode *State of the Environment Report* (SoER) yang dikembangkan *United Nation Environment Program* (UNEP). Metode dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi/status lingkungan hidup secara transparan, penyebab/penekan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dampak yang terjadi serta respon Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi.



Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2007

Disadari bahwa penyusunan buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran perbaikan demi penyempurnaannya pada tahun-tahun mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak/instansi/dinas dan para ahli atas segala partisipasinya sehingga buku ini dapat diterbitkan. Lebih khusus disampaikan pula terima kasih kepada Ibu Bupati Bolaang Mongondow yang selama ini memberikan perhatian yang mendalam terhadap penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 ini maupun perhatiannya terhadap berbagai masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian.

Kotamobagu, 15 November 2007

**Kepala BAPEDALDA
Kabupaten Bolaang Mongondow**

Ir. Dj. MOKOGINTA
NIP. 080 098 714

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan Penulisan Laporan.....	I-2
1.3. Manfaat Penulisan Laporan.....	I-3
1.4. Visi dan Misi.....	I-3
1.5. Gambaran Umum.....	I-10
1.6. Kebijakan Pembangunan Bekelanjutan.....	I-34
BAB II ISU LINGKUNGAN.....	II-44
2.1. Kerusakan Hutan.....	II-44
2.2. Kerusakan Ekosistem DAS	II-45
2.3. Pencemaran.....	II-46
2.4. Konversi Lahan.....	II-46
2.5. Pencemaran Merkuri Akibat Penambangan Emas Tradisional	II-46
BAB III A I R.....	III-48
3.1. Potensi Curah Hujan.....	III-48
3.2. Potensi Air Permukaan.....	III-53
3.3. Kualitas Air.....	III-53
BAB IV U D A R A.....	IV-61
BAB V HUTAN DAN LAHAN.....	V-63
5.1. Kondisi Hutan.....	V-63
5.2. Kondisi Lahan.....	V-65

BAB VI	KEANEKARAGAMAN HAYATI.....	VI-66
BAB VII	REKOMENDASI.....	VII-68
	7.1. Penanganan Terhadap Pemanfaatan Lahan.....	VII-68
	7.2. Pemantauan Terhadap Daerah Rawan Banjir.....	VII-68
	7.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	VII-69
	7.4. Supremasi Hukum.....	VII-69
	7.5. Pengendalian Penduduk Terhadap Lahan.....	VII-69
	7.6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.....	VII-70
	7.7. Pelayanan Kesehatan.....	VII-70
	DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar	1.1.	Letak Kabupaten Bolaang Mongondow di Propinsi Sulawesi Utara	I-12
2.	Gambar	1.2.	Perkembangan Lulusan SD,SLTP,SMK & SMU di Kabupaten Bolaang Mongondow	I-13
3.	Gambar	1.3.	Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow	I-23
4.	Gambar	1.4.	Peta Benca Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow	I-24
5.	Gambar	1.5.	Peta RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow	I-30
6.	Gambar	1.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006	I-32
7.	Gambar	1.7.	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang mongondow	I-33
8.	Gambar	3.8.	Rata – rata Curah Hujan Setiap Bulan Tahun 2006	III-49
9.	Gambar	3.9.	Rata – rata Curah Hujan Per Kecamatan Tahun 2006	III-50
10.	Gambar	3.10.	Peta Rata – rata Curah Hujan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2006	III-52
11.	Gambar	3.11.	Kosentrasi Ph Air Sungai Tahun 2006	III-54
12.	Gambar	3.12.	Kosentrasi BOD Air Sungai Tahun 2006	III-55
13.	Gambar	3.13.	Kosentrasi COD Air Sungai Tahun 2006	III-56
14.	Gambar	3.14.	Kosentrasi DO Air Sungai Tahun 2006	III-57
15.	Gambar	3.15.	Kosentrasi TSS Air Sungai Tahun 2006	III-58
16.	Gambar	3.16.	Kosentrasi Sianida Air Sungai Tahun 2006	III-59
17.	Gambar	3.17.	Kosentrasi Air Raksa Air Sungai Tahun 2006	III-60
18.	Gambar	4.18.	Jumlah Penderita ISPA di Kabupaten Bolaang Mongondow	IV-62
19.	Gambar	4.19.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 2006	IV-62
20.	Gambar	5.20.	Persentase Kawasan Hutan Menurut Fungsi	V-63
21.	Gambar	5.21.	Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow	V-64
22.	Gambar	5.22.	Luas Lahan Kritis Tahun 2007	V--65

ABSTRAK

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terletak antara 00 30' - 10 0' Lintang Utara dan 1230 - 1240 Bujur Timur. Batas-batasnya meliputi :

- ☛ Sebelah utara - laut Sulawesi
- ☛ Sebelah timur - Minahasa Selatan
- ☛ Sebelah selatan - Teluk Tomini
- ☛ Sebelah barat - Provinsi Gorontalo

Secara administratif terbagi kedalam 32 kecamatan dan 329 desa/kelurahan kondisi

sampai bulan Juni 2007. Luas keseluruhannya mencapai 8,358,04 KM². Dengan luas sebesar itu, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, karena mencakup lebih dari separuh wilayah Sulawesi Utara setelah Gorontalo berdiri menjadi wilayah Provinsi sendiri. Terdapat 17 gunung di Bolaang Mongondow. Yang tertinggi adalah gunung Batu Bulawan dengan ketinggian 1.970 M, sedangkan yang paling rendah adalah gunung Mongaladia dengan ketinggian 1.325 M, keduanya terletak di Kecamatan Bolang Uki. Tercatat ada satu gunung berapi yang pernah meletus pada tahun 1939, yaitu gunung Ambang dengan ketinggian dari permukaan laut mencapai 1.689 M dan daerah bahaya sekitar 62,9 KM², serta daerah waspada dinyatakan sekitar 70,2 Km². Hal ini tentu saja memerlukan pengamatan yang intensif dari berbagai pihak yang berwenang. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 18 sungai. Sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87 Km dan yang terpendek adalah sungai Salongo yang panjangnya 9,1 KM. Keberadaan sungai-sungai ini sangat bermanfaat bagi sektor pertanian di Bolaang Mongondow, sehingga sektor ini tetap merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Bolaang Mongondow. Selain sungai, terdapat 8 buah danau, yang terluas adalah Danau Moat yang luasnya mencapai 617 Ha dan yang terkecil adalah Danau Tondok seluas 10 Ha. Bolaang Mongondow memiliki ketinggian yang bervariasi, Kecamatan yang tertinggi adalah Modayag dengan ketinggian 650 M dari permukaan laut, selanjutnya Kecamatan Passi dengan ketinggian 450 M, diikuti oleh Kecamatan Kotamobagu, dan Dumoga. Sementara kecamatan disekitar pantai hanya memiliki ketinggian 1 - 2 M dari permukaan laut. Hal ini berakibat pada tekstur alam Bolaang Mongondow yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Sebagai daerah yang terletak di garis katulistiwa, maka Kabupaten Bolaang

Mongondow hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan sepanjang tahun sangat tinggi dan secara umum meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari yang mencapai 332,5 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 3,6 mm. Hujan turun sepanjang tahun, dan hal ini berdampak positif bagi sektor pertanian.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, kebijakan pembangunan lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2006-2011 bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran sampai tahun 2011 adalah terlindunginya sumberdaya alam dari kerusakan. Kebijakan pembangunan lingkungan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing satuan kerja daerah dalam bentuk rencana strategi yang memuat tentang program-program pencapaian pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, menggariskan bahwa arahan pemanfaatan ruang secara umum dikelompokkan ke dalam arahan pemanfaatan ruang kawasan fungsi lindung (non budidaya) dan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya. Berdasarkan SK Menhut No. 452/Kpts-II/1 1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Propinsi Sulawesi Utara, merupakan arahan pemanfaatan ruang dan hasil kesepakatan antar sektor/instansi yang terkait. Kawasan Hutan dan Perairan, meliputi:

- Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 193.646,70 ha;
- Hutan Lindung seluas 95.088,56 ha;
- Hutan Produksi Terbatas seluas 159.609,62 ha;
- Hutan Produksi seluas 50.826,40 ha;
- Hutan Konversi seluas 14.643,40 ha;

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sosial budaya daerah yang dapat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebagai berikut : 1) Menumbuhkembangkan taraf dan mutu kehidupan sosial masyarakat untuk mendukung kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial masyarakat, 2) Mengaktualisasikan nilai—nitai budaya lokal dengan prinsip *Mototompiaan, Mototabian bo Mototanoban, Mobobahasaan, Mooaheran bo Mobobangkalan*, 3) Menciptakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, 4) Mengkampanyekan secara luas

budaya bersih, budaya peduli, budaya tertib, budaya sehat, budaya koreksi dan budaya anti tindak kekerasan, 5) Menciptakan secara terus menerus dan berkelanjutan pembinaan, penerapan dan pelestarian budaya tolok tradisional yang relevan dengan perkembangan zaman dan mempunyai nilai jual ke wisatawan lokal maupun mancanegara dengan tetap memelihara identitas dan jati diri masyarakat Bolaang Mongondow pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya, 6) Mewujudkan perkembangan kualitas pendidikan di semua strata jenjang pendidikan sehingga mampu seoptimal mungkin memanfaatkan peluang di era otonomi daerah dan mengatasi tantangan globalisasi, 7) Melestarikan budaya rukun antar agama dan solidaritas lintas etnis, saling membantu dan menguntungkan dengan jiwa dan semangat Torang Samua Basudara dan 8) Menciptakan dan mendorong produk pendidikan yang mempunyai daya saing dan daya kompetitif sehingga mampu memasuki pasar tenaga kerja terdidik dipasar global dengan penyempurnaan kurikulum lokal dan mengembangkan sekolah-sekolah unggulan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar lokal dan global.

Evaluasi dan analisis terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan dengan pendekatan model Tekanan-Status-Respon (Pressure-State- Response/P-S-R model). Kegiatan pembangunan yang secara empirik telah memberi tekanan pada keseluruhan komponen lingkungan hidup, di antaranya adalah : (1) kegiatan pembangunan pertanian; (2) kegiatan pembangunan perikanan; (3) kegiatan pembangunan transportasi; (4) kegiatan pembangunan kehutanan; (5) kegiatan pembangunan pemukiman; (6) kegiatan pertambangan; (7) kegiatan perindustrian; dan (8) kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat. Kedelapan kegiatan pembangunan ini telah memberi tekanan baik pada komponen lingkungan abiotik (fisik-kimia), komponen lingkungan biotik (biota darat dan perairan), maupun pada komponen lingkungan culture (sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat).

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Geliat pembangunan yang makin meluas dan kompleks akan mendatangkan dampak positif dan negatif terhadap eksistensi lingkungan. Dampak positif dapat berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi berupa terjadinya banjir dan degradasi lingkungan.

Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi masa kini dan generasi akan datang. Laju pembangunan yang semakin meningkat akan memacu roda perekonomian, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka diperkirakan akan semakin memberikan tekanan terhadap sumberdaya alam terutama sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Dalam kaitan itu, maka diperlukan suatu upaya pembangunan yang tetap berwawasan lingkungan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tetap menjaga pemanfaatan secara lestari demi mempertahankan keseimbangannya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur-unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup kedalam kerangka proses pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara ekosistem lingkungan dengan manusia beserta sebab akibatnya.

Dalam forum Economic and Social Commission for Asia Pacific (ESCAP) pada tahun 1995 disepakati penggunaan metode P-S-R (*Pressure-State-Response*) dari United Nation Environment Program (UNEP) untuk menyusun State of the Environment Report (SoER). Pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konkritnya, pemerintah di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) wajib menyediakan informasi lingkungan hidup dan

menyebarkannya kepada masyarakat. Untuk menilai sampai sejauhmana pemanfaatan sumberdaya dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, maka diperlukan suatu analisis tentang status lingkungan hidup. Menyadari hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) pada tahun 2007 sebagai bentuk penyediaan informasi lingkungan mutakhir yang nantinya akan menjadi acuan dan atau masukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan ke depan.

Penyusunan SLHD merupakan upaya untuk memonitor kondisi lingkungan hidup, sehingga dapat diperoleh potret perubahan lingkungan dari tahun ke tahun. Penyajian dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan informasi dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk merumuskan isu-isu pokok lingkungan hidup. Berdasarkan isu-isu pokok tadi, maka program pengelolaan lingkungan dapat dirancang dengan fokus penanganan pada program rencana tindak (action plan). Sebagai acuan utama penyusunan laporan-laporan yakni *Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang diedarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup edisi tahun 2007*.

1.2. TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Tujuan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

- Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistim pelaporan publik serta bentuk dari akuntabilitas publik.
- Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
- Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah; serta sebagai

landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama – sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

1.3. MANFAAT PENULISAN LAPORAN.

Manfaat laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Untuk meningkatkan mutu informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Untuk menyediakan sumber informasi lingkungan, baik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan selanjutnya menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Untuk menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan monitoring, pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan tata praja lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebagai landasan publik untuk berperan dalam penentuan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (bangun praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif; serta
- Sebagai wahana edukasi untuk peningkatan kesadaran publik dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

1.4. VISI DAN MISI.

1.4.1. Visi.

Untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan keinginan semua pihak dengan meminimalisir permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan perlu merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang implementasinya diarahkan pada beberapa hal yaitu:

Pertama; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ditandai adanya *ciri-ciri*; masyarakat yang partisipatif, demokratis, profesional dan melaksanakan pembangunan sesuai *law and order* menuju pengelolaan pembangunan yang baik atau pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kedua; memperbaiki perekonomian baik ditingkat mikro (masyarakat) maupun ditingkat makro (nasional) memperdayakan sektor-sektor ekonomi rakyat pedesaan, menggali sumber-sumber ekonomi lokal yang memiliki potensi pasar atas inisiatif masyarakat.

Ketiga; pemantapan kelembagaan *sosial*, ekonomi, politik, hukum, dan administrasi pemerintahan.

Keempat; pemantapan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif (pembangunan partisipatif).

Atas dasar pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dibutuhkan visi yang dapat menyatukan hati, pikiran dan gerak langkah semua pihak terutama para pemangku kepentingan *untuk* bersama-sama secara sinergi dan harmonis merubah kendala dan hambatan menjadi peluang.

Untuk menuju satu titik temu dan berbagai keinginan, maka perlu dirumuskan suatu platform yang membawa tindakan *realistis*, terukur, terjangkau dan berwawasan masa depan sehingga untuk mewujudnyatakannya dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow 2006 - 2011 sebagai berikut: **“Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru, yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing, Maju dan Mandiri”**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, berikut ini dijelaskan definisi dan pernyataan visi tersebut sebagai berikut:

- **Bolaang Mongondow baru** ; merupakan perwujudan komitmen kuat untuk menuju perubahan yang lebih baik, produktif dan dinamis.
- **Bersatu** ; mewujudkan komitmen kuat bahwa persatuan dan kesatuan serta ketenteraman dan ketertiban dalam wadah NKRI menjadi dambaan masyarakat Bolaang Mongondow.
- **Berbudaya** ; bahwa masyarakat Bolaang Mongondow patut melestarikan budaya lokal yang telah berurat dan berakar di bumi Totabuan maupun budaya yang positif yang dimiliki oleh etnis dan suku bangsa Indonesia yang hidup, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya *budaya sebagai* cita, citra, rasa dan karsa yang diterjemahkan padanannya sebagai budi (akal budi) dan daya (daya upaya); mengartikan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman, kita berupaya untuk memajukan Bolaang Mongondow.
- **Berdaya Saing**; tidak jauh dari budaya berdasar akal dan daya upaya dengan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun Bolaang Mongondow kedepan *agar dapat* lebih maju *dan* sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
- **Maju** berarti modern ; yaitu kondisi kerangka sosial yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inovatif, beraneka ragam secara fungsional dan memiliki skill yang tinggi.
- **Mandiri** ; dalam hal ini diwujudkan dengan makin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penentuan kebijakan serta makin kuatnya kemampuan daerah melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam penetapan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, terdapat beberapa mandat yang menjadi pedoman, yaitu

visi dan misi Nasional, serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mandat tersebut perlu diperhatikan untuk menjaga agar mata rantai pembangunan secara nasional tidak putus.

Secara rinci visi misi Nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

● **Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004 — 2009, yaitu:**

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

● **Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004— 2009, yaitu:**

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

● **Strategi Pokok Pembangunan, yaitu:**

1. Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keanekaragaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dan amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sedangkan visi, misi Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut;

■ **Visi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2010 adalah:**

“Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”

1. **Berbudaya** ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian / jati diri yang dinamis, kreatif, inovativ, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
2. **Berdaya Saing** ; Tewujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul disegala bidang.
3. **Sejahtera** ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dan segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

■ **Misi Provinsi Sulawesi Utara:**

1. Mengembangkan suasana kondusif dan mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menerapkan *clean goverment* dan *good governance* yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib dan disiplin.
4. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum dan hak asasi manusia.
5. Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
6. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang.
8. Mengelola secara optimal sumber daya alam SULUT secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

9. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.
10. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global.
11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
12. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
13. Menurunkan pengangguran, kemiskinan dan mengurangi masalah — masalah sosial.

1.4.2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan diatas maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondow kawasan yang berbasis ragam budaya lokal (multikulturalisme)

Daerah ini dikenal dengan daerah yang kaya dengan budaya, adat istiadat bahkan daerah ini memiliki keanekaragaman budaya, etnis dan agama yang sangat tinggi. Potensi tersebut merupakan sebuah kekuatan dalam membangun daerah ini dimasa datang. Bolaang Mongondow di masa datang diharapkan dapat menjadi kawasan yang berbasis ragam budaya lokal yang perlu terus menerus dilestarikan dalam menunjang budaya Nasional.

2. Menjalankan prinsip-prinsip Good Governance.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, prinsip-prinsip *good governance* perlu diwujudkan. Hal ini penting sebagai upaya mendorong pemerintahan yang memiliki kepercayaan dari masyarakat.

3. Meningkatkan SDM dan pemberdayaan Potensi Lokal.

Dalam menunjang pembangunan daerah, maka pemerintah harus fokus dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Selain itu, diperlukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap potensi lokal sehingga dapat menunjang percepatan pembangunan daerah.

4. Membangun daerah yang ramah lingkungan

Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat penting memperoleh perhatian dan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam agar dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk menunjang pembangunan daerah, maka pemerintah dan masyarakat harus senantiasa berlandaskan pada pembangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilakukan sehingga akan tercipta keseimbangan daya dukung antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

5. Meningkatkan pelayanan publik yang partisipatif .

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang partisipatif. Dengan dasar itulah, perlu terus dilakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, yang efektif dan partisipatif dari masa ke masa.

6. Membangun sarana dan prasarana publik.

Dalam rangka menunjang kegiatan masyarakat, maka perlu membangun sarana dan prasarana publik. Infrastruktur tersebut sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat

Sektor ekonomi rakyat adalah salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah ini, maka perlu upaya-upaya pemberdayaan terhadap sektor ekonomi yang berbasis masyarakat, sehingga dan waktu ke waktu pendapatan masyarakat akan dapat meningkat.

8. Pengembangan wilayah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan .

Berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik harus terus dilakukan, terutama dalam mendorong pengembangan daerah Bolaang Mongondow, yaitu pembentukan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Upaya-upaya ini di satu sisi diperlukan untuk pendekatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.5. GAMBARAN UMUM

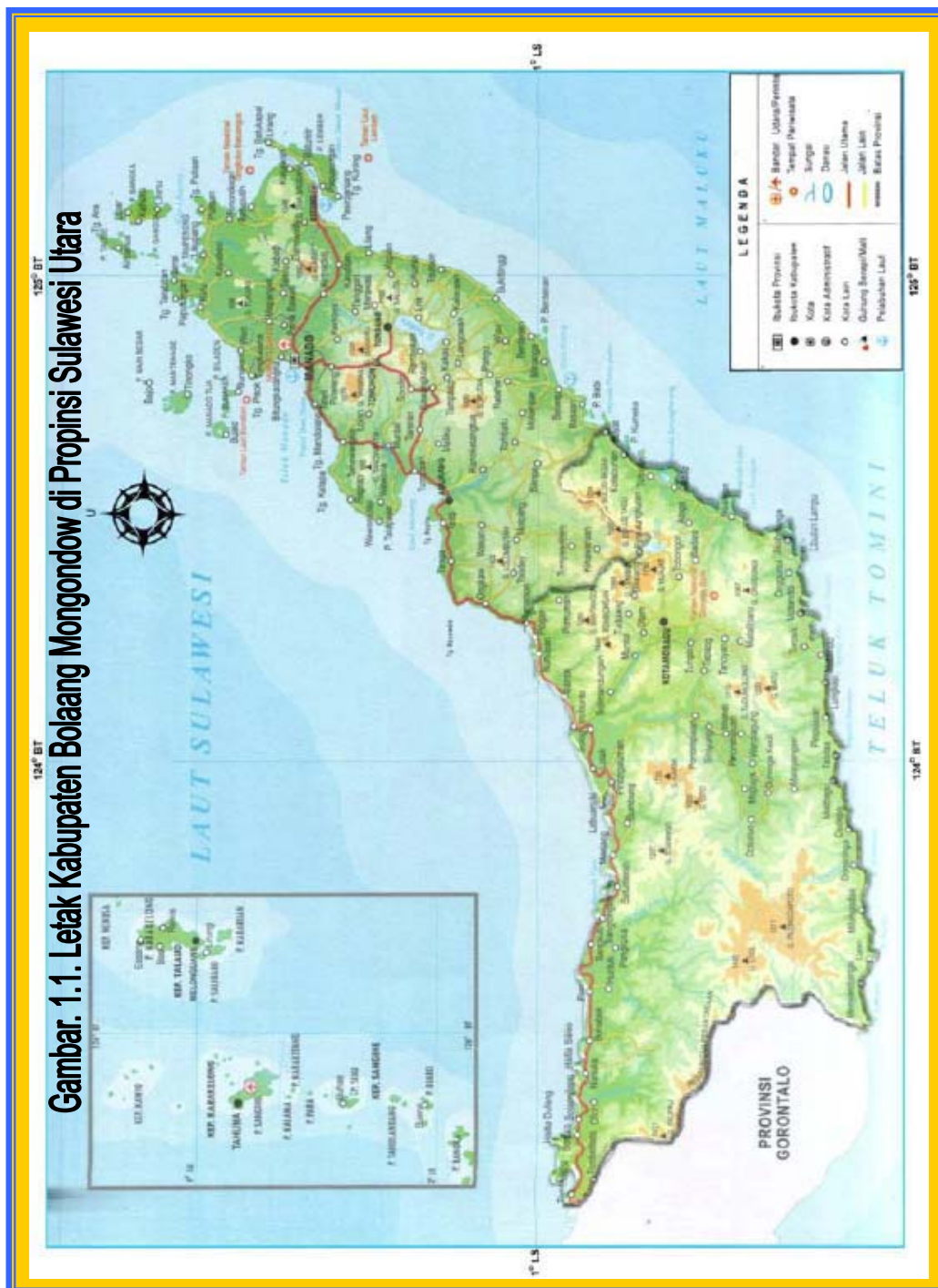
1.5.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terletak antara 00 30' - 10 0' Lintang Utara dan 1230 - 1240 Bujur Timur. Batas-batasnya meliputi :

- ▣ Sebelah utara - laut Sulawesi
- ▣ Sebelah timur - Minahasa Selatan
- ▣ Sebelah selatan - Teluk Tomini
- ▣ Sebelah barat - Provinsi Gorontalo

Berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tanggal 20 Pebruari 2007, Kecamatan Modayag mekar menjadi Modayag dan Modayag Barat, SK No. 38 / 20 Pebruari 2007, Kecamatan Kotabunan mekar menjadi Kotabunan dan Tutuyan, SK No. 39 tgl 20 Pebruari 2007 Kecamatan Bolaang merkar menjadi Bolaang dan Bolaang Timur dan SK No. 40 / 20 Pebruari 2007, Kecamatan Passi Timur mekar menjadi Passi Timur dan Bilalang, sehingga kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 32 kecamatan dan 329 desa/kelurahan kondisi sampai bulan Juni 2007. Luas keseluruhannya mencapai 8,358,04 KM². Dengan luas sebesar itu, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, karena mencakup lebih dari

separuh wilayah Sulawesi Utara setelah Gorontalo berdiri menjadi wilayah Provinsi sendiri. Terdapat 17 gunung di Bolaang Mongondow. Yang tertinggi adalah gunung Batu Bulawan dengan ketinggian 1.970 M, sedangkan yang paling rendah adalah gunung Mongaladia dengan ketinggian 1.325 M, keduanya terletak di Kecamatan Bolang Uki. Tercatat ada satu gunung berapi yang pernah meletus pada tahun 1939, yaitu gunung Ambang dengan ketinggian dari permukaan laut mencapai 1.689 M dan daerah bahaya sekitar 62,9 KM², serta daerah waspada dinyatakan sekitar 70,2 Km². Hal ini tentu saja memerlukan pengamatan yang intensif dari berbagai pihak yang berwenang. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 18 sungai. Sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87 Km dan yang terpendek adalah sungai Salongo yang panjangnya 9,1 KM. Keberadaan sungai-sungai ini sangat bermanfaat bagi sektor pertanian di Bolaang Mongondow, sehingga sektor ini tetap merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Bolaang Mongondow. Selain sungai, terdapat 8 buah danau, yang terluas adalah Danau Moat yang luasnya mencapai 617 Ha dan yang terkecil adalah Danau Tondok seluas 10 Ha. Kecamatan yang tertinggi adalah Modayag dengan ketinggian 650 M dari permukaan laut, selanjutnya Kecamatan Passi dengan ketinggian 450 M, diikuti oleh Kecamatan Kotamobagu, dan Dumoga. Sementara kecamatan disekitar pantai hanya memiliki ketinggian 1 - 2 M dari permukaan laut. Hal ini berakibat pada tekstur alam Bolaang Mongondow yang bergununggunung dan berbukit-bukit. Sebagai daerah yang terletak di garis katulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan sepanjang tahun sangat tinggi dan secara umum meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari yang mencapai 332,5 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 3,6 mm. Hujan turun sepanjang tahun, dan hal ini berdampak positif bagi sektor pertanian.

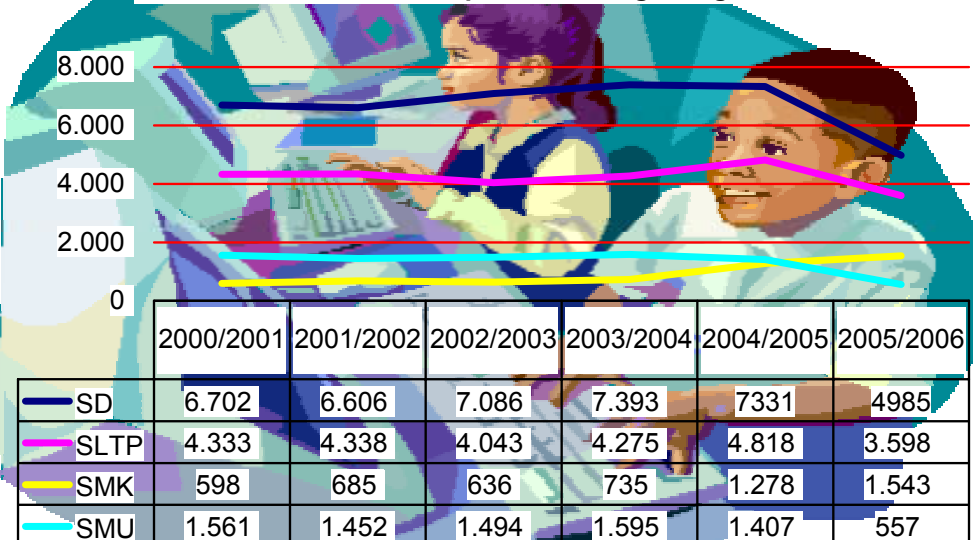


1.5.2. Kondisi Demografis

1.5.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need) untuk setiap manusia. Disamping itu, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD '45, bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha pencerdasan masyarakat ini harus didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Secara umum terjadi peningkatan jumlah murid pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada semua jenjang pendidikan terjadi peningkatan jumlah murid dari tahun ketahun, kecuali pendidikan SD yang mengalami penurunan jumlah murid. Hal tersebut mengindikasikan kecenderungan masyarakat untuk memilih pendidikan yang lebih menekankan pada aspek keterampilan, sehingga lebih mudah untuk masuk kedunia kerja.

Gambar.1.2. Perkembangan Lulusan SD,SLTP,SMK dan SMU di Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2007, BPS,2007.

1.5.2.2. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tenaga kerja merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan. Pada tahun 2006, berdasarkan hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2006, terdapat sebanyak 396.583 penduduk usia kerja (10 tahun keatas). Bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk 100 penduduk usia kerja. TPAK Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2006 adalah 54,27 %, meningkat dalam 3 tahun terakhir, dimana tahun 2003 sebesar 53,04 %. Namun jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2000 sebesar 48,86 %, maka terjadi kenaikan yang signifikan selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Apabila dilihat dari mereka yang termasuk penduduk angkatan kerja, maka 85,74 % diantaranya melakukan kegiatan bekerja, sedangkan sisanya mencari pekerjaan. Menurut catatan yang terdapat pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bolaang Mongondow, selama tahun 2006, banyaknya pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5.837 orang. Banyaknya permintaan akan tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker, yaitu 165 orang. Hal tersebut menggambarkan ketimpangan antara banyaknya pencari kerja dan permintaan tenaga kerja. Banyaknya pencari kerja yang berhasil ditempatkan selama tahun 2006 sebanyak 194 orang, dimana seluruhnya merupakan mereka yang berpendidikan Diploma III/sarjana muda dan sarjana.

Komposisi Penduduk Yang Bekerja Dari keseluruhan penduduk yang bekerja, 65,95 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor Perdagangan (8,85 %), dan Jasa Kemasyarakatan (8,62 %). Disektor

Perdagangan, peranan pekerja wanita lebih besar dibanding pekerja laki-laki, yaitu 132,28 persen. Sedangkan sektor lainnya masih didominasi oleh kaum laki-laki.

1.5.2.3. Sejarah Bolaang Mongondow.

Penduduk asli Bolaang Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Teneduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, awalnya mereka tinggal di gunung Komasaan (Bintauna). Kemudian menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli', Ginolantungan sampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia', tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain. Peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Nama **Bolaang** berasal dari kata "bolango" atau "balangon" yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan **Mongondow** dari kata 'momondow' yang berarti berseru tanda kemenangan. Desa Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan desa Mongondow terletak sekitar 2 km selatan Kotamobagu. Daerah pedalaman sering disebut dengan 'rata Mongondow'. Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, baik yang yang berdiam di pesisir pantai maupun yang berada di pedalaman Mongondow di bawah pemerintahan Raja Tadohe, maka daerah ini dinamakan **Bolaang Mongondow**. Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang **Bogani** (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh. Mokodoludut adalah punu' Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu yang pertama). Sejak

Tompunu'on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu'on, akibat pengaruh pedagang Belanda dirubah istilah Tompunu'on menjadi Datu (Raja). Tadohe dikenal seorang Datu yang cakap, sistem bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokoagow (ayah Tadohe). Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (**Kinalang**) dan rakyat (**Paloko'**). Paloko' harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko' melalui pembangunan disegala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat. Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan bogannya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru. Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang, Mongondow (Passi dan Lolayan), Kotabunan, Dumoga, disatukan menjadi Bolaang Mongondow. Di masa ini mulai dikenal mata uang real, doit, sebagai alat perdagangan. Pada zaman pemerintahan raja Corenelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi yang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Sekitar tahun 1867 seluruh penduduk Bolaang Mongondow sudah menjadi satu dalam bahasa, adat dan kebiasaan yang sama (menurut N.P Wilken dan J.A.Schwarz). Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinan Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui

Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppo dengan kedudukan istana raja di desa Bolaang. Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di **Kotobangon** pada tahun 1901. Pada tahun 1904, dilakukan perhitungan penduduk Bolaang Mongondow dan berjumlah 41.417 jiwa. Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh *zending* di beberapa desa; yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Pasi, Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa. Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lulusan sekolah rakyat 3 tahun. Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disalah satu tempat di kaki gunung Sia' dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915. Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional. Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih

terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : **Pogogutat** (potolu adi'), **Tonggolipu'**, Posad (**mokidulu**). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaannya agak berbeda. Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (**modapug**) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam mereka juga membuka kebun. Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut **Totabuan** yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah. Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya disuguhi sirih pinang, tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam **kabela'** (dari kebiasaan ini diciptakan **tari kabela** sebagai tari penjemput tamu). Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan. Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam diantaranya **tarian tradisional** yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke', Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga **tarian kreasi baru** seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe. Upacara monibi terakhir diadakan pada tahun 1939 di desa Kotobangon (tempat kedudukan istana raja) dan di desa Matali (tempat pemakaman raja dan keturunannya). Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) dan ditempatkan di Desa Werdhi Agung. Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi (1992/1993). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Propinsi

Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I. Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa setiap tanggal **23 Maret** seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai **HUT Kabupaten Bolaang Mongondow**. Seiring dengan Nuansa Reformasi dan Otonomi Daerah, telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2007 dan Kota Kotamobagu melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan utama pembentukan Kab. Bolmong Utara dan Kota Kotamobagu adalah untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

I.5.3 Kondosi Geologi

Batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sangat bervariasi dan dikelompokkan menjadi beberapa formasi. Batuan tertua adalah batuan gunung api yang termasuk dalam Formasi Tinombo yang berumur Eosen. Batuan ini terdiri dan lava yang bersusunan basalt dan andesit dengan selingan batu pasir, batu lanau, batu gamping merah dan kelabu, serta sedikit konglomerat. Selanjutnya batuan sedimen yang disusun oleh serpih dan batu pasir dengan sisipan batu gamping dan rijang. Batu pasirnya terdiri dan batu pasir kuarsa. Batuan ini berumur Eosen hingga Oligosen. Batuan gunung api Bilungala terdiri dan breksi, tufa dan lava.

Di beberapa tempat batuan ini sudah mengalami alterasi. Pada satuan batuan ini juga dijumpai batu gamping yang berwarna kelabu. Batuan ini berumur Miosen Bawah hingga Miosen Akhir. Formasi Tapadaka disusun oleh batu pasir, serpih dan batu gamping yang berwarna kelabu dan sangat pejal. Formasi ini berumur Miosen Awal hingga Miosen Akhir. Batuan batuan tersebut di atas diterobos oleh batuan beku yang disusun oleh diorit, diorit kuarsa, granit dan granodiorit. Batuan beku ini dijumpai setempat-setempat di bagian selatan dan bagian barat laut Kabupaten Bolaang Mongondow.

Batuan gunung api yang berumur Pliosen Awal disusun oleh breksi aglomerat, dan tufa. Di beberapa tempat dijumpai juga endapan Molasa Sulawesi yang berumur Pliosen-Pliosen yang sifatnya kurang padu. Selanjutnya dijumpai batuan yang berumur Kuartar yang terdiri dari batuan gunung api Ambang, endapan danau yang menyusun daerah lembah Kotamobagu dan Dumoga, endapan pantai dan terumbu karang. Batuan-batuan ini pada umumnya masih belum padu.

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari sesar dan lipatan. Sesar normal di bagian barat cenderung berarah timur-barat, sedang di bagian timur cenderung berarah utara barat laut - selatan tenggara. Sesar geser umumnya berpasangan dan cenderung berarah utara timur laut — selatan tenggara. Lipatan yang dijumpai menunjukkan daerah ini beberapa kali mengalami aktivitas tektonik.

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow memungkinkan untuk terbentuknya beberapa macam mineral, baik mineral logam maupun mineral non logam yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri. Mineral logam yang dijumpai di wilayah ini terutama adalah emas. Beberapa diantara jebakan emas ini sudah dan pernah diusahakan baik oleh perusahaan swasta asing maupun oleh penduduk setempat. Mineral non logam atau sering dikenal dengan bahan galian industri banyak macamnya dan beberapa diantaranya sudah diketahui dengan pasti jumlah cadangan dan kualitasnya.

Berdasarkan kelompok umum sebaran litologi (batuan) pada peta geologi (Apandi, T., & S. Bachri, 1997), Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikelompokkan menjadi enam (6) bagian sebaran litologi, yaitu:

1. Endapan Permukaan (Qa, Ql, QPI).
2. Endapan Gunungapi Muda (Qts dan TQpv)
3. Batuan Sedimen (Tmts dan Tmtl).
4. Batuan Gunungapi Tua (Tmbv dan TmbI).
5. Batuan Tertua (Tetv dan Tets).
6. Batuan Terobosan (Diorit Bone atau Tmb).

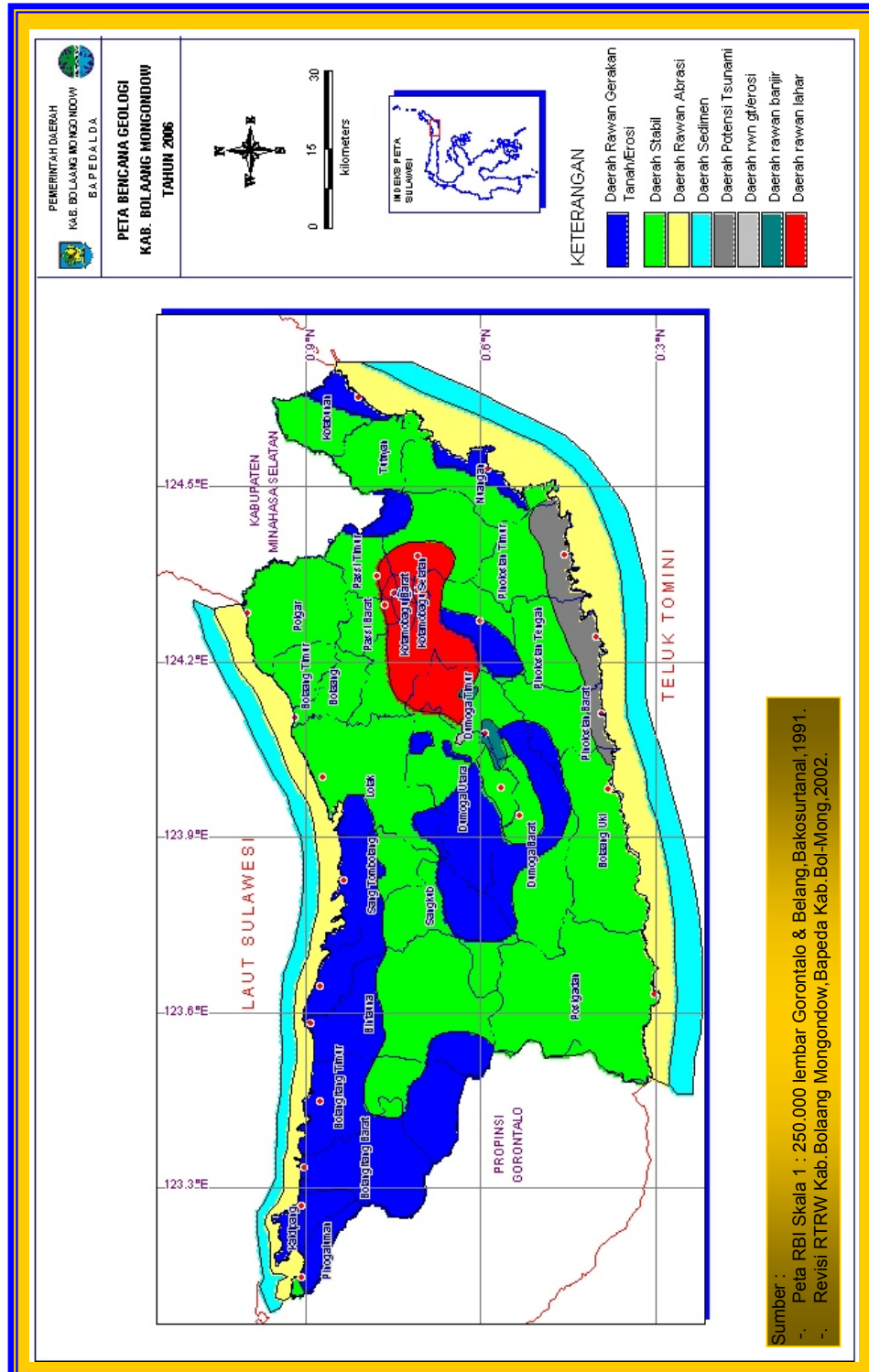
Batuan tertua berupa Bantuan Gunung api (Tetv) dan Formasi Tinombo (Tmts) yang menjadi dasar bagi batuan lainnya yang lebih muda, tersebar setempat-setempat pada bagian barat Kotamobagu dengan kedudukan lapisan miring ke arah selatan — baratdaya dan dibatasi oleh kontak patahan. Di atasnya diendapkan satuan Batuan Gunung api Tua (Tmbv dan TmbI); sebagian besar berupa Tmbv yang tersebar relatif merata dalam wilayah ini, kecuali satuan TmbI hanya terdapat di bagian timur Danau Mooat (timur Kotamobagu).

Di atas endapan Tmbv dan TmbI diendapkan Batuan Sedimen (Tmts) dan Batugamping (Tmtl) tersebar di bagian barat Kotamobagu hingga ke arah utara, kedudukan lapisan miring selatan — tenggara - timur. Sedangkan satuan Batugamping (Tmtl) tersebar secara setempat pada bagian barat laut — barat dan Kotamobagu, berupa lensa dan ke arah samping berubah menjadi Batuan Sedimen (Tmts). Di atas batuan Tmts dan Tmtl, diendapkan Batuan Gunungapi Muda (QTV dan TQpv), satuan QTV tersebar setempat di sekitar Kotamobagu dan terluas terdapat di Pegunungan Bone Simandaka (baratdaya Kotamobagu). Sedangkan satuan Gunungapi Ambang (Qa) hanya terdapat di sekitar Gunungapi Ambang (1780 m — timur Kotamobagu). Sebelum terdapat Batuan Gunungapi Muda (QTV dan TQpv), terjadi kegiatan tektonik berupa patahan retakan dan diikuti pula naiknya magma yang membentuk batuan terobosan berupa Granit (gr), Diorit (di) dan Granodiorit (gd) dan Diorit Bone (Tmb).

Sebagian kontak batuan terobosan dengan batuan samping (lebih tua dan QTv), terjadi proses mineralisasi dengan hadirnya mineral sulfida berupa Pirit (FeS_2) dan Kalkopinit (CuFeS). Proses mineralisasi ini membawa pula Emas (Au); seperti terlihat pada peta geologi dengan tanda CuAu yang terdapat di barat laut desa Maangpangga (barat Gn. Piboluhunga) dan utara desa Negenilama (sebatan Pegunungan Simandaka). Setelah proses vulkanisme Gunungapi Ambang, diikuti pula proses Erosi, Sedimentasi dan terbentuknya Batugamping Koral (QI), Molasa Celebes Sarasi (QTs) dan Endapan Sungai (Lembah/pantai - Qal).

Penyebaran patahan sangat intensif di sekitar Kotamobagu dan di antara Pegunungan Bone — Telongabila, arah umum patahannya adalah timurlaut — baratdaya dan barat laut — tenggara, barat — timur serta utara — selatan.

Gambar.1.4. Peta Bencana Geologi Kab.Bolaang Mongondow



1.5.4. Tata Ruang.

UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, menggariskan bahwa arahan pemanfaatan ruang secara umum dikelompokkan ke dalam arahan pemanfaatan ruang kawasan fungsi lindung (non budidaya) dan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya. Berdasarkan SK Menhut No. 452/Kpts-II/1 1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Propinsi Sulawesi Utara, merupakan arahan pemanfaatan ruang dan hasil kesepakatan antar sektor/instansi yang terkait. Kawasan Hutan dan Perairan, meliputi:

- Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 193.646,70 ha;
- Hutan Lindung seluas 95.088,56 ha;
- Hutan Produksi Terbatas seluas 159.609,62 ha;
- Hutan Produksi seluas 50.826,40 ha;
- Hutan Konversi seluas 14.643,40 ha;

1.5.4.1. Kawasan Fungsi Lindung.

Berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 dan Undang-Undang Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992, Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. kawasan lindung, adalah:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, meliputi;
 - Kawasan hutan lindung;
 - Kawasan bergambut;
 - Kawasan resapan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi;
 - Sempadan pantai;
 - Sempadan sungai,
 - Kawasan sekitar waduk/danau;
 - Kawasan sekitar mata air;

- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam, meliputi;
 - Kawasan suaka alam;
 - Pantai berhutan bakau;
 - Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - Taman nasional, taman hutan raya, tanaman wisata alam;
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana.

Dengan melihat kesesuaian lahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang didominasi oleh hutan lindung dan kawasan suaka alam, maka rencana pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan sangat hati-hati dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga kelestarian lingkungan dapat terjamin dan perubahan ekosistem dapat diminimalkan. Dari hasil pembahasan terdahulu, dijelaskan bahwa luas kawasan fungsi lindung di Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami pengurangan cukup signifikan yang disebabkan oleh penduduk perambah hutan dan peladang berpindah. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakseimbangannya ekosistem lingkungan hidup pada kawasan tersebut, sehingga perlu segera dilakukan pemulihan. Untuk menjamin terwujudnya upaya pemulihan lingkungan dan fungsi konservasi sumberdaya hutan, ditempuh upaya-upaya reklamasi pada kawasan tersebut seperti penanaman kembali tegakan hutan, mereboisasi lahan hutan yang kritis yang dilaksanakan secara terus menerus. Selanjutnya, dan hasil analisis kesesuaian lahan dengan berdasarkan pada Keppres No. 32/90, maka kesesuaian lahan kawasan lindung terdiri dan:

- (a) Kawasan Hutan Lindung, dengan luas penggunaan lahan adalah kurang lebih 1.110 km². Lokasi kawasan hutan lindung tersebut tersebar hampir pada seluruh kecamatan di

Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama di Kecamatan Dumoga, Bolang Uki, Passi, Kotabunan dan Bolaang Itang.

(b) Kawasan Resapan Air , sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian air tanah, dengan luas penggunaan lahan kurang lebih 982,5 km². Lokasi kawasan ini tersebar hampir di semua kecamatan dengan luas yang bervariasi, terutama di kecamatan Pinolosian.

(c) Kawasan Suaka Alam dan Hutan Wisata.

Pemanfaatan ruang Kawasan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 173.290 ha. Lokasi kawasan tersebut meliputi Kecamatan Dumoga, Bolang Uki, Passi, dan Modayag.

(d) Kawasan Taman Nasional.

Kawasan Taman Nasional Dumoga-Bone terletak di Kecamatan Dumoga dengan luas 141.000 ha. Taman Nasional ini merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki potensi keanekaragaman ekosistem.

Pemanfaatan kawasan lindung tersebut di atas, berfungsi untuk memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, seperti:

- ▶ Kawasan Bergambut yaitu kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.
- ▶ Kawasan Resapan Air yaitu kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air tersebut pada umumnya diarahkan pada DAS hulu sebagai kawasan tangkapan air (catchment area).
- ▶ Sempadan Pantai yaitu kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi pantai dan muara sungai.
- ▶ Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer,

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

- ▶ Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting sebagai daerah tangkapan air berfungsi dalam mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- ▶ Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- ▶ Kawasan Taman Nasional yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.
- ▶ Suaka Alam Hutan adalah kawasan hutan yang memiliki keadaan yang menarik baik secara alamiah maupun buatan manusia, dan dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk rekreasi dan berolahraga.
- ▶ Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

1.5.4.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya yang dikelompokkan menurut kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan pemukiman.

Dalam rencana struktur tata ruang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, penentuan wilayah sebagai kawasan dengan fungsi dominannya, di samping mengacu pada Keppres No. 32/90 tentang kriteria kawasan budidaya, juga mempertimbangkan aspek lain, meliputi:

- Potensi sumberdaya alamnya;
- Lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan;

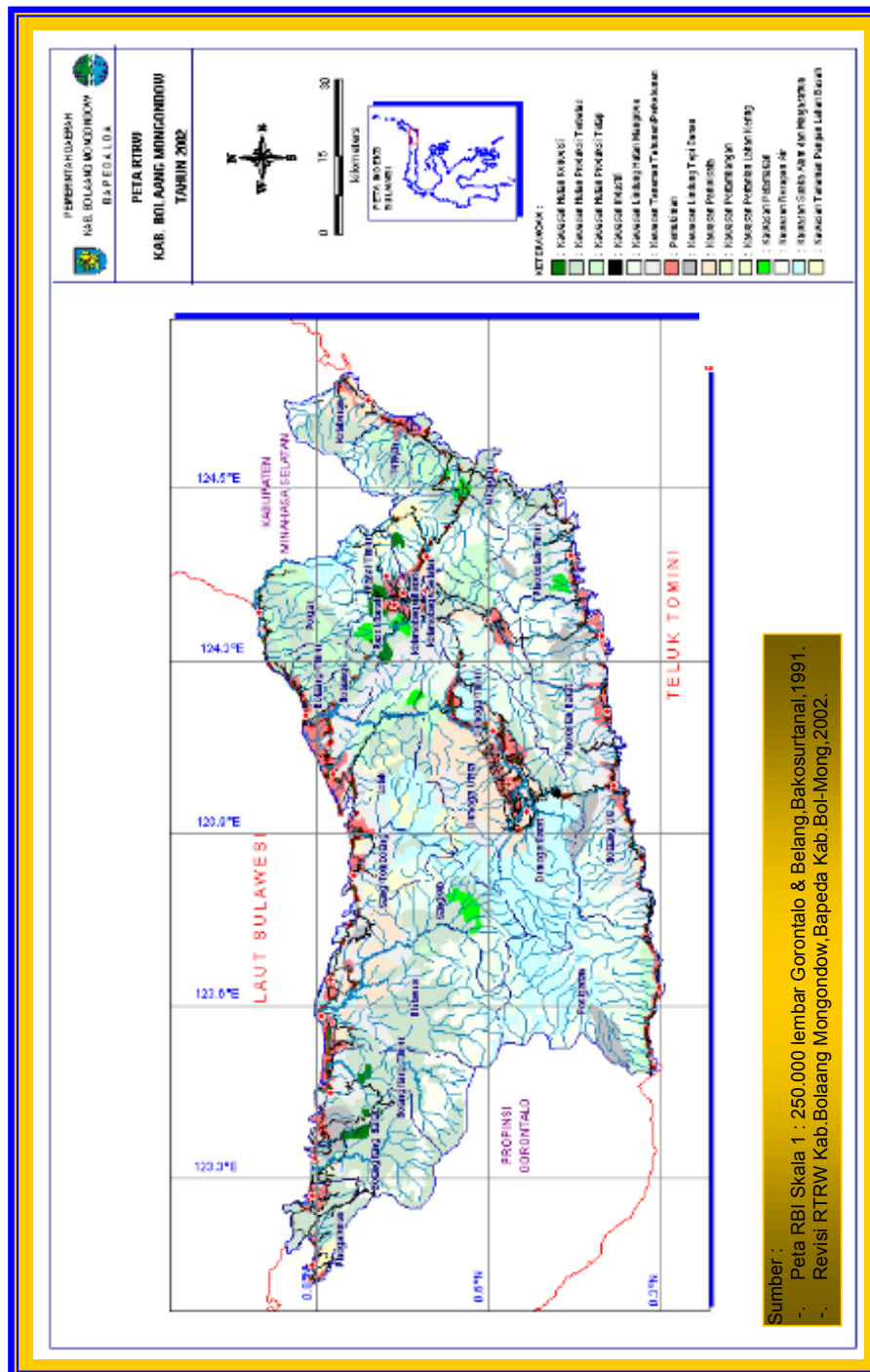
- Keserasian, keselarasan, fungsi dan estetika, kualitas ruang, Keseimbangan fungsi budidaya dan lindung, dimensi waktu, sosial budaya, teknologi, dan hankam;
- Tahapan pembiayaan, pengelolaan pembangunan, dan kelembagaan.

1.5.2.3. Kawasan Prioritas/Strategis

Kawasan prioritas merupakan kawasan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya. Berdasarkan hasil analisis, wilayah/kawasan yang diprioritaskan dalam rangka penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, mencakup 3 jenis kawasan prioritas. Adapun wilayah/kawasan yang dimaksud antara lain;

- Kawasan andalan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yaitu kawasan yang dianggap cukup potensial dan segi fisik/lahan, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan wilayah. Termasuk dalam kawasan andalan ini adalah Kawasan energi panas bumi, pertambangan, pertanian, pariwisata, industri, dan hutan.
- Kawasan yang rawan bencana (kawasan banjir, kawasan rawan pangan dan kesehatan, kawasan rawan kebakaran), termasuk juga kawasan lahan kritis.
- Kawasan Pemukiman.
- Kawasan Tertentu.

Gambar.1.5. Peta RTRW Kab.Bolaang Mongondow



1.5.5. Kependudukan

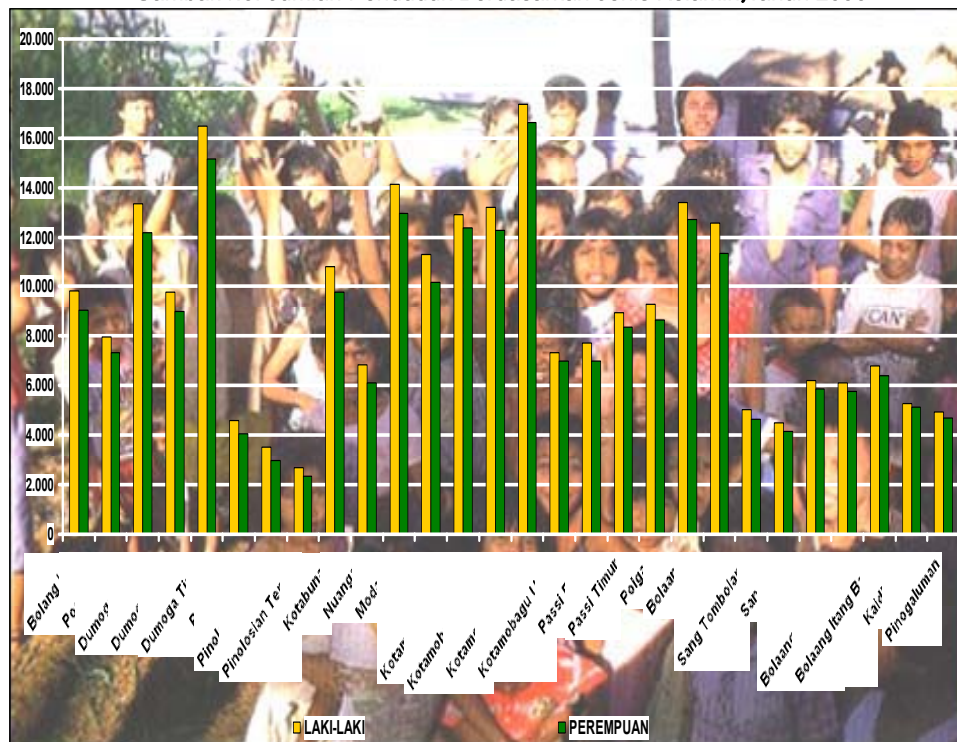
Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan pemerintah melalui Program Keluarga Berencana yang dimulai awal tahun 1970-an. Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow ketika tahun 2000 sebesar 429.475 jiwa. Angka ini merupakan angka hasil Sensus Penduduk 2000. Dari jumlah tersebut sebagian besar penduduk masih masuk ke dalam kategori usia muda (< 35 tahun), Jumlah penduduk tahun 2006 adalah sebesar 486.895 jiwa. Angka ini merupakan hasil estimasi penduduk akhir tahun 2006. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,47 % per tahun selama periode 1991-2001. Pada periode tersebut, sebagian besar kecamatan mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk kecuali beberapa kecamatan diwilayah pantai utara. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Dumoga (Dumoga barat, Dumoga utara, dan Dumoga timur), yaitu 1,08 % pertahun. Laju pertumbuhan penduduk telah turun secara tajam sejak tahun 1980. Dari angka 3,96 % pada periode 1971-1980, turun menjadi 2,20% pada periode 1981-1991, hingga mencapai 1,47 % pada periode 1992-2001. Penurunan laju pertumbuhan sejak tahun 1980 ini berkaitan erat dengan keberhasilan Program Keluarga Berencana.

Secara umum persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan cukup merata, dengan tingkat kepadatan 58,25 jiwa per kilometer persegi. Namun di Ibukota kabupaten, tepatnya di Kotamobagu, yang luasnya hanya kurang dari 3 % luas seluruh wilayah kabupaten, dihuni hampir 20 % dari total penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Ibu kota kabupaten mencapai lebih dari 537 penduduk per kilometer persegi. Di kecamatan lain, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 12,44 hingga 154,01 penduduk per kilometer

persegi. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Sang Tombolang.

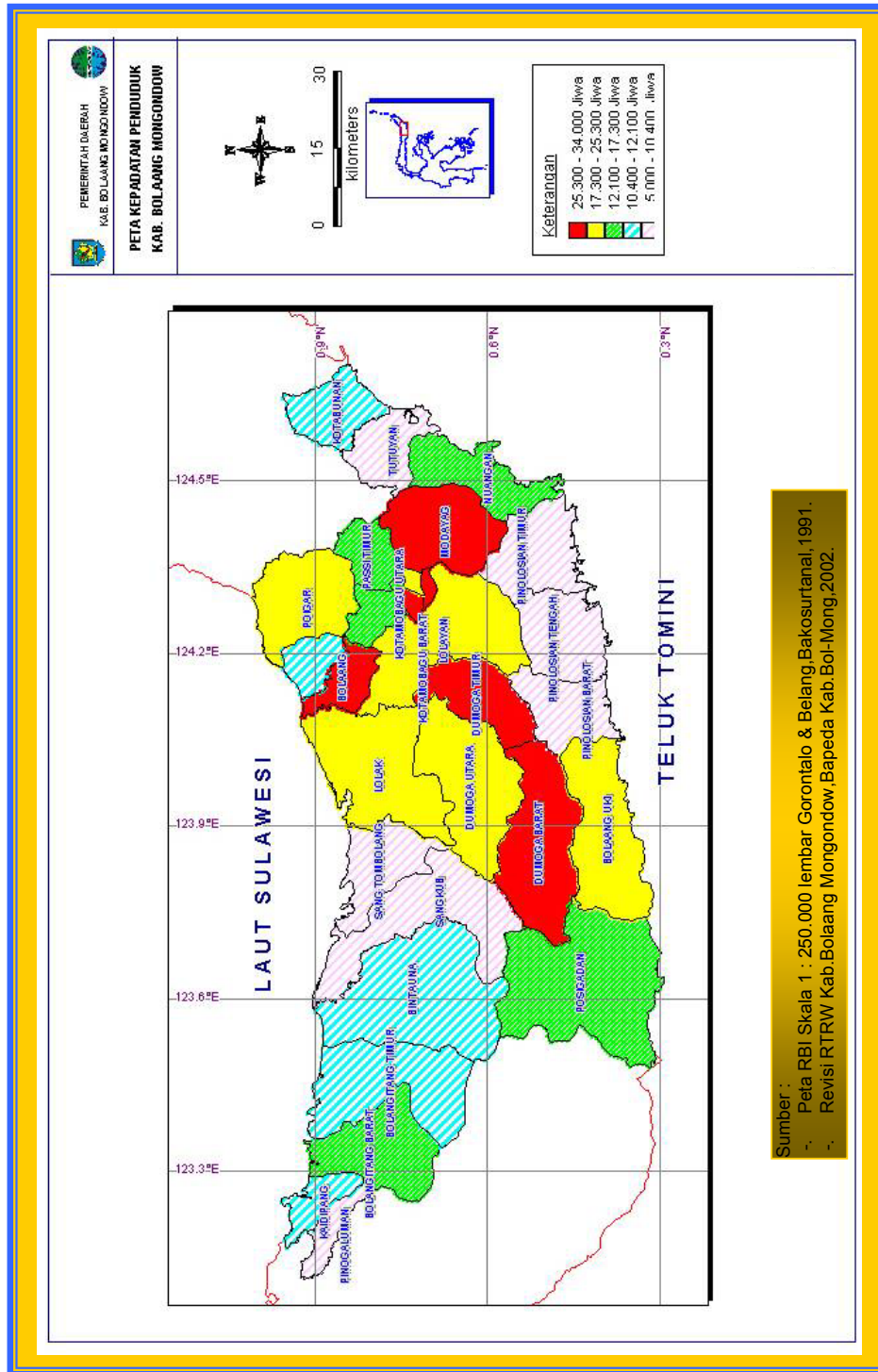
Berdasarkan angka hasil estimasi Penduduk Akhir Tahun 2006, angka rasio jenis kelamin Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 108,03. Angka rasio jenis kelamin yang diatas nilai 100 mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah wanita, sebaliknya angka rasio jenis kelamin yang dibawah 100, mengindikasikan jumlah wanita lebih tinggi dibandingkan jumlah pria. Banyak rumah tangga tahun 2006 tercatat sebanyak 125.964 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebesar 3,87 orang.

Gambar.1.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2006



Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka2007 ,BPS.2007

Gambar.1.7. Peta Kepadatan Penduduk Kab.Bolaang Mongondow Tahun 2006



Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang murah, mudah, dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang diinginkan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar masyarakat berperilaku hidup sehat dan penyediaan fasilitas seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, dan pondok bersalin. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan diharapkan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan pengadaan fasilitas Rumah Sakit yang hanya ada di wilayah ibukota kabupaten. Secara resmi jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari, 5 buah Rumah Sakit, 31 Puskesmas, 129 Puskesmas Pembantu, dan 389 Posyandu. Tenaga kesehatan seperti Dokter umum telah tersebar diseluruh kecamatan. Namun untuk Dokter gigi masih kurang, sehingga ada beberapa kecamatan yang belum memiliki dokter gigi. Hasil kegiatan imunisasi yang dilakukan pada masing-masing Puskesmas menunjukkan hasil yang cukup baik. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit ini diutamakan untuk bayi, anak-anak SD, ibu hamil, dan wanita usia subur.

1.6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow 2006 - 2011 sebagai berikut:

“Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru, yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing, Maju dan Mandiri”

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, berikut ini dijelaskan definisi dan pernyataan visi tersebut sebagai berikut:

- **Bolaang Mongondow baru** ; merupakan perwujudan komitmen kuat untuk menuju perubahan yang lebih baik, produktif dan dinamis.
- **Bersatu** ; mewujudkan komitmen kuat bahwa persatuan dan kesatuan serta ketenteraman dan ketertiban dalam wadah NKRI menjadi dambaan masyarakat Bolaang Mongondow.

- **Berbudaya** ; bahwa masyarakat Bolaang Mongondow patut melestarikan budaya lokal yang telah berurat dan berakar di bumi Totabuan maupun budaya yang positif yang dimiliki oleh etnis dan suku bangsa Indonesia yang hidup, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya *budaya sebagai* cita, citra, rasa dan karsa *yang* diterjemahkan padanannya sebagai budi (akal budi) dan daya (daya upaya); mengartikan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman, kita berupaya untuk memajukan Bolaang Mongondow.
- **Berdaya Saing**; tidak jauh dari budaya berdasar akal dan daya upaya dengan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun Bolaang Mongondow kedepan *agar dapat* lebih maju *dan* sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
- **Maju** berarti modern ; yaitu kondisi kerangka sosial yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inovatif, beraneka ragam secara fungsional dan memiliki skill yang tinggi.
- **Mandiri** ; dalam hal ini diwujudkan dengan makin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penentuan kebijakan serta makin kuatnya kemampuan daerah melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

1.6.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup.

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, kebijakan pembangunan lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2006-2011 bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran sampai tahun 2011 adalah terlindunginya sumberdaya alam dari kerusakan. Kebijakan pembangunan lingkungan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing satuan kerja daerah dalam bentuk rencana strategi yang memuat tentang program-program pencapaian pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, Program Lingkungan Hidup yang meliputi :

A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan:

1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
3. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
5. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
6. Bimbingan teknis persampahan
7. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
8. Kerjasama pengelolaan persampahan
9. Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
2. Koordinasi penilaian langit biru
3. Pemantauan Kualitas Lingkungan
4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
5. Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
6. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 .
7. Pengkajian dampak lingkungan.
8. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
9. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
10. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
11. Pengembangan produksi ramah lingkungan

12. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
13. Koordinasi penyusunan AMDAL
14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
15. Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan:

1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.
2. Pantai dan Laut Lestari
3. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
4. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
5. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
6. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
7. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
8. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
9. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
11. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut .
12. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
13. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.
14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pertindungan dan konservasi SDA
15. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.
16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

D. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Kegiatan:

1. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
2. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Rehabilitasi hutan dan lahan.
4. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
5. Penyusunan pecioman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
6. Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

E. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan:

1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2. Pengembangan data dan informasi lingkungan
3. Penyusunan data sumberdaya alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) nasional dan daerah
4. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

F. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Kegiatan:

1. Pengujian emisi kendaraan bermotor.
2. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri.

3. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.
 5. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- G. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
- Kegiatan:
1. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
 2. Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- H. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- Kegiatan:
1. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
 2. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
 3. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
 4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
 5. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- I. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
- Kegiatan:
1. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
 2. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut.
- J. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Kegiatan:

1. Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
2. Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH.
3. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
4. Penyusunan program pengembahan RTH.
5. Penataan RTH.
6. Pemeliharaan RTH.
7. Pengembangan taman rekreasi.
8. Pengawasan dan pengendalian RTH.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
10. Monitoring dan evaluasi.

1.6.2. Kebijakan Sosial Budaya Daerah.

Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sosial budaya daerah yang dapat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebagai berikut : 1) Menumbuhkembangkan taraf dan mutu kehidupan sosial masyarakat untuk mendukung kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial masyarakat, 2) Mengaktualisasikan nilai— nitai budaya lokal dengan prinsip *Mototompiaan, Mototabian bo Mototanoban, Mobobahasaan, Mooaheran bo Mobobangkalan,* 3) Menciptakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, 4) Mengkampanyekan secara luas budaya bersih, budaya peduli, budaya tertib, budaya sehat, budaya koreksi dan budaya anti tindak kekerasan, 5) Menciptakan secara terus menerus dan berkelanjutan pembinaan, penerapan dan pelestarian budaya tokal tradisonal yang relevan dengan perkembangan zaman dan mempunyai nilai jual ke wisatawan lokal maupun mancanegara dengan tetap memelihara identitas dan jati diri masyarakat Bolaang Mongondow pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya, 6) Mewujudkan perkembangan kualitas pendidikan disemua strata jenjang pendidikan sehingga mampu seoptimal mungkin memanfaatkan peluang di era otonomi daerah dan mengatasi

tantangan globalisasi, 7) Melestarikan budaya rukun antar agama dan solidaritas lintas etnis, saling membantu dan menguntungkan dengan jiwa dan semangat Torang Samua Basudara dan 8) Menciptakan dan mendorong produk pendidikan yang mempunyai daya saing dan daya kompetitif sehingga mampu memasuki pasar tenaga kerja terdidik dipasar global dengan penyempurnaan kurikulum lokal dan mengembangkan sekolah-sekolah unggulan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar lokal dan global.

Keberhasilan pembangunan ditinjau dan aspek sosial budaya dan kemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan yang positif dan dinamis berkat dan program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dan perkembangan nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing agama berjalan dengan baik dan tidak pernah menimbulkan gejolak, walaupun masyarakat Bolaang Mongondow sangat majemuk namun dalam pergaulan masyarakat telah tumbuh dan berkembang semangat nasionalisme dan persatuan yang tinggi dengan semboyan MOTOTABIAN, MOTOTANOBAN, BO MOTOTOMPIAAN. Pembangunan Sosial ini didukung dengan tiga pilar yaitu disiplin, profesionalisme, dan loyalitas yang tercermin dan proses interaksi antara komponen masyarakat dalam menyikapi berbagai perkembangan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow tumbuh subur demi kepentingan berbangsa dan bernegara.

1.6.3. Kebijakan Ekonomi.

Kebijakan dan program pembangunan telah banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat disemua sektor dan lapangan usaha. Kondisi sosial ekonomi daerah dari tahun ke tahun mengalami perubahan kearah peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran umum tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada perubahan indikator ekonomi didaerah selang tiga tahun terakhir.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

tahun 2003 sebesar Rp. 2.191.245.000.000.- meningkat menjadi Rp. 2.823.115.000.000.- pada tahun 2004 atau naik 28,84 %. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar Rp. 3.641.818.350.000.- atau naik sebesar 6,23%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 sebesar 3,47 %, tahun 2004 naik menjadi 4,80 % dan tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 11,69 %.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Bertaku pada tahun 2003 sebesar Rp. 4.837.185,00.- meningkat menjadi Rp. 6.150.557,00.- pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005 menjadi Rp. 6.465.230,00.- atau meningkat sebesar 5,12 %.

Adapun jenis-jenis pendapatan yang menjadi bagian dan pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.691.000.000.- realisasi sebesar Rp. 2.411.345.- atau 89,62 %, 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.859.348.800.- realisasi Rp. 5.276.690.081.- atau 108,59 %, 3) Laba Perusahaan Milik Daerah ditargetkan sebesar Rp. 51.000.000.- realisasi Rp. 32.000.000.- atau 62,75 %, dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar 1.038.000.000.- realisasi Rp. 6.137.445.190.- atau 591,28 %.

Jenis Pendapatan yang menjadi bagian dan pos dana penmbangan terdiri dan ; 1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun 2005 ditargetkan sebesar Rp. 23.375.513.878.- realisasi Rp. 17.314.914.173.- atau 74,07 %, 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 239.965.000.000.- realisasi 100 %, 3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 15.490.000.000.- *realisasi* 100 %, 4) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dan Provinsi (tidak ditargetkan) realisasi Rp. 8.710.732. 120.-

Bantuan Dana Kontijensi I Penyeimbang dari pemerintah sebesar Rp. 17.289000.000.- realisasi Rp. 14.280.000.000.-. Tidak dapat diingkari bahwa bantuan pendanaan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, DAK ataupun Sumber Dana Lainnya masih sangat dominan dan hingga saat ini bantuan pendanaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena dengan perkenan-Nya, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 ini dapat tersusun. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan dapat terlaksana dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia.

Menyimak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan potensi, karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah guna menjamin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup Daerah tersebut, maka sangat diperlukan data dan informasi yang menggambarkan suatu analisis tentang kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2007 ini terdiri dari dua Buku yang merupakan kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Guna mewujudkan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu ***Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru, yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing, Maju dan Mandiri.***

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2007 ini, disusun dengan mengacu pada metode *State of the Environment Report* (SoER) yang dikembangkan *United Nation Environment Program* (UNEP). Metode dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi/status lingkungan hidup secara transparan, penyebab/penekan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dampak yang terjadi serta respon Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi.

tersebut masih tetap kita butuhkan dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa kebijakan pengembangan ekonomi daerah antara lain sebagai berikut : 1) Menciptakan iklim berusaha yang sehat dan kondusif bagi pengusaha dan badan usaha dengan peningkatan pelayanan melalui satu atap (One Stop Service) dan satu unit pusat informasi pembangunan dan perdagangan (Development Information Centre), 2) Membantu dan mendorong seoptimal mungkin penciptaan dan pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan asas *saling menghormati dan saling menguntungkan*, 3) *Mendorong* terciptanya produktifitas ekonomi kerakyatan dengan membangun home industri yang mempunyai kualitas, daya tarik dan nilai jual di pasar lokal maupun pasar global, 4) Mewujudkan daya tarik seoptimal mungkin bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan investasi, 5) Mendorong pembangunan fasilitas untuk perdagangan sesuai master plan kabupaten dengan memperluas lokasi-lokasi pertumbuhan produk ekonomi dan pasar, 6) Mewujudkan iklim berusaha dan peningkatan peran koperasi sehingga mampu masuk dalam perekonomian dan perdagangan global, 7) Mendorong iklim usaha dan sinergitas peran ekonomi menengah kebawah (UKM) dengan Kelompok Usaha Makro untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, dan 8) Membudayakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (environmentaly) kepada masyarakat.

BAB II. ISU LINGKUNGAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dikombinasikan dengan hasil-hasil studi terdahulu, diperoleh beberapa isu-isu pokok (right issue) lingkungan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2007 yaitu:

2.1. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan merupakan isu pokok lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain penebangan ilegal (illegal logging), perambahan hutan dan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Penebangan ilegal merupakan faktor penyebab utama kerusakan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penebangan ilegal ini dilakukan di hampir semua kawasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow, baik di kawasan lindung, kawasan konservasi dan kawasan produksi baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pengusaha-pengusaha hutan. Selain kerugian materi yang sangat besar, penebangan liar ini telah menimbulkan berbagai bencana dan ketidakstabilan ekologis di daerah ini.

Berbagai jenis hama berkembang tanpa kendali, punahnya berbagai spesies potensial dan semakin seringnya terjadi banjir yang diikuti oleh pengikisan tanah (erosi) dan longsor. Apabila



kondisi tersebut tidak segera diatasi maka dalam jangka panjang akan mengembang pada ketidakseimbangan iklim, degradasi tanah dan kemunduran daya dukung lingkungan terhadap pembangunan dan kehidupan.



Kawasan Hutan Lindung dan TNBNW yang mengandung emas yang bernilai ekonomis tinggi merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan emas di kawasan tersebut .

Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah strategis secara terus menerus dalam mengendalikan pembalakan liar, perambahan hutan dan penambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah ini.

Faktor penyebab kerusakan hutan lainnya adalah perambahan hutan. Perambahan hutan dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan perladangan, yang kemudian berkembang menjadi pemukiman dan bila tidak ada langkah-langkah pencegahannya maka masyarakat kemudian mengokupasi lahan tersebut dengan berbagai alasan.

Mengingat intensitas perambahan hutan yang sudah begitu tinggi di daerah ini dan telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan maka perlu segera diambil langkah-langkah pencegahan dan pengendaliannya. Penerapan sanksi hukum perlu dilakukan secara tegas, tanpa melihat latar belakang pelakunya. Dalam pengendalian perambahan hutan ini perlu dilakukan kordinasi yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat peduli hutan serta asosiasi-asosiasi pengusaha kayu di daerah ini.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu di bangun satu kebijakan yang diikuti oleh peraturan daerah bagi penyelamatan hutan dan ekosistem di daerah ini.

2.2. Kerusakan Ekosistem DAS

Kerusakan ekosistem DAS merupakan salah satu isu pokok di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kerusakan ekosistem DAS ini disebabkan berbagai faktor antara lain kebijakan pertanahan (pemanfaatan lahan) yang tidak searah dengan kepentingan lingkungan, kemampuan ekonomi dan teknologi pemanfaatan tanah dari petani yang masih rendah, belum adanya persepsi dan pemahaman yang baik dari masyarakat dan pemerintah tentang perubahan kondisi lingkungan akibat tindakan manusia yang salah dan perambahan hutan yang terus berlanjut.

Akibat kerusakan ekosistem DAS di daerah ini telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, meluasnya lahan kritis, erosi, longsor dan lain-lain. Mengingat bahwa kerusakan ekosistem DAS ini membawa implikasi yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat,

maka perlu diambil langkah-langkah strategis untuk penanggulangan dan pengendaliannya.

2.3. Pencemaran

Pencemaran merupakan isu utama lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pencemaran ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah sentra industri, perkotaan dan pusat-pusat pemukiman tetapi juga terjadi di daerah-daerah pedesaan. Pencemaran yang lebih memprihatinkan saat ini adalah pencemaran akibat penggunaan pestisida dan pupuk pada areal-areal pertanian serta pencemaran sungai akibat berbagai aktifitas masyarakat pedesaan disepanjang bantaran sungai. Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran ini maka perlu segera diambil langkah-langkah penanggulangan dan pengendaliannya.

2.4. Konversi Lahan

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar, sementara lahan-lahan untuk permukiman semakin terbatas, mengakibatkan terjadinya perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun (built up areas).

2.5. Pencemaran Merkuri akibat Penambangan Emas Tradisional.

Penggunaan Merkuri secara sembarangan merupakan hal yang umum pada pertambangan skala kecil. Penggunaan teknologi yang sederhana dan efektif dalam mengikat emas, telah membuat amalgamsi sebagai salah satu metode pilihan para penambang kecil. Akan tetapi resiko kesehatan dan dampaknya terhadap lingkungan telah diabaikan. Kegiatan Penambang Emas Tradisional yang sebagian besar berlokasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan pendangkalan dan perubahan bentang dasar sungai akibat pengendapan lumpur atau pasir, meningkatnya kekeruhan air sungai dan tingkat keasaman (pH) yang rendah, dan pencemaran ekosistem air sungai yang diakibatkan oleh penggunaan merkuri (Hg) selama proses pengolahan / pemisahan biji emas.

Berdasarkan telaah isu-isu lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka diperoleh gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Perambahan kawasan hutan untuk kepentingan lahan pertanian, penambangan emas, merupakan realita yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terbatasnya pemahaman masyarakat akibat perambahan kawasan hutan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada sisi lain, lemahnya dukungan regulasi oleh pemerintah secara simultan turut mempengaruhi keleluasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengrusakan lingkungan. Indikator lain yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat adalah pembuangan limbah cair dan padat ke badan air tanpa melalui treatment. Pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan hasil buangan dari aktivitas sosial ekonomi dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk penekanan biaya untuk kegiatan pembuangan limbah. Kondisi tersebut jika tidak diantisipasi sejak awal dapat berdampak pada pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu ekosistem utamanya ekosistem kawasan pesisir.

BAB III

AIR

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya, termasuk kegiatan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan telah meningkatkan kebutuhan sumber daya air. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, bahkan di beberapa tempat dikategorikan berada dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang



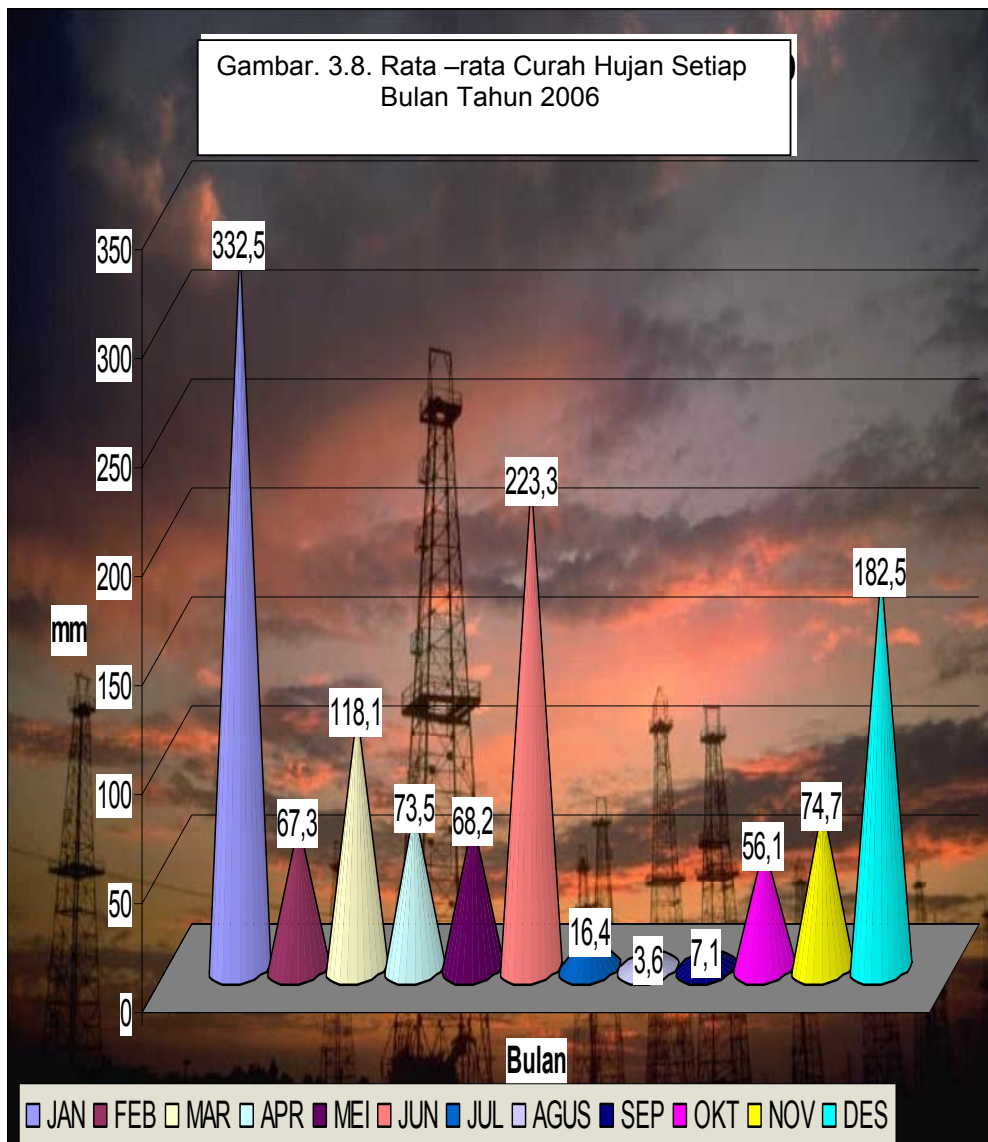
mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air. Kondisi sumber daya air di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengalami defisit, tapi hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi jika kegiatan pembangunan mengabaikan kelestarian lingkungan dan merubah fungsi daerah tangkapan air. Di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan kualitas air, bahkan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Walaupun

ketersediaan air dari waktu ke waktu relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi, keadaan dan kualitasnya yang kurang memenuhi syarat menyebabkan pemakaian dan pemanfaatannya menjadi terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan, kelestarian sumber daya air perlu dijaga. Prinsip dasar yang berkaitan dengan pemanfaatan air yang efisien juga harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan konservasi sumber daya air.

3.1. Potensi Curah Hujan

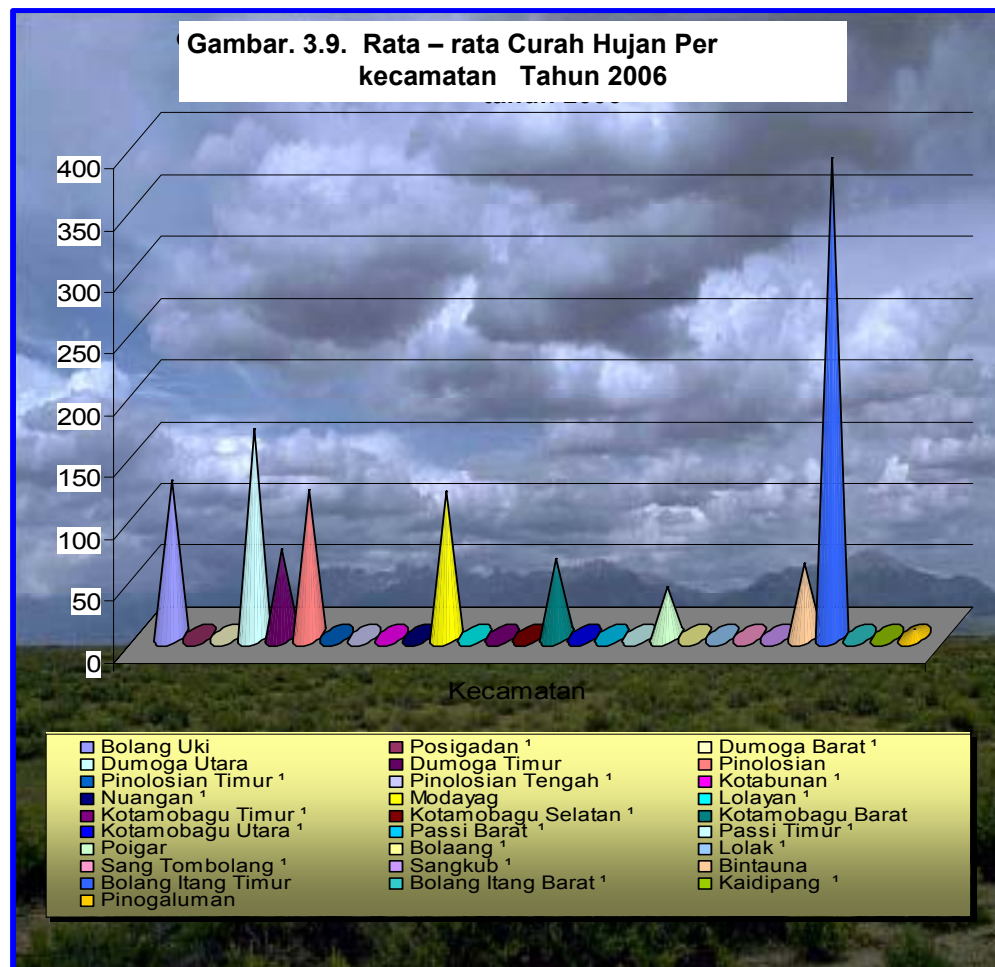
Daya dukung air suatu wilayah merupakan parameter perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, atau dapat didefinisikan sebagai

kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Saat ini kondisi sumber daya air di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengalami defisit seperti yang terjadi di daerah Pulau Jawa, namun bila pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung seperti yang terjadi saat ini di daerah Pulau Jawa, tidak mustahil Kabupaten Bolaang Mongondow akan mengalami defisit air pada suatu saat.



Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2007, BPS, 2007

Potensi air Kabupaten Bolaang Mongondow dari sumber curah hujan selama 10 tahun terakhir cukup bervariasi yaitu curah hujan terendah hanya sebesar 0,73 mm dan curah hujan tertinggi sebesar 3.519 mm, untuk tahun 2006 rata – rata curah hujan per kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, curah hujan terendah hanya sebesar 4,67 mm di kecamatan Pinogaluman dan curah hujan tertinggi sebesar 386,72 mm di Kecamatan Bolaang Itang Timur sebelah utara Kabupaten Bolaang. Menurut data yang ada tahun 2006, rata – rata curah hujan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertinggi pada bulan januari sebesar 332,5 mm dan yang terendah pada bulan agustus hanya sebesar 7,1 mm.

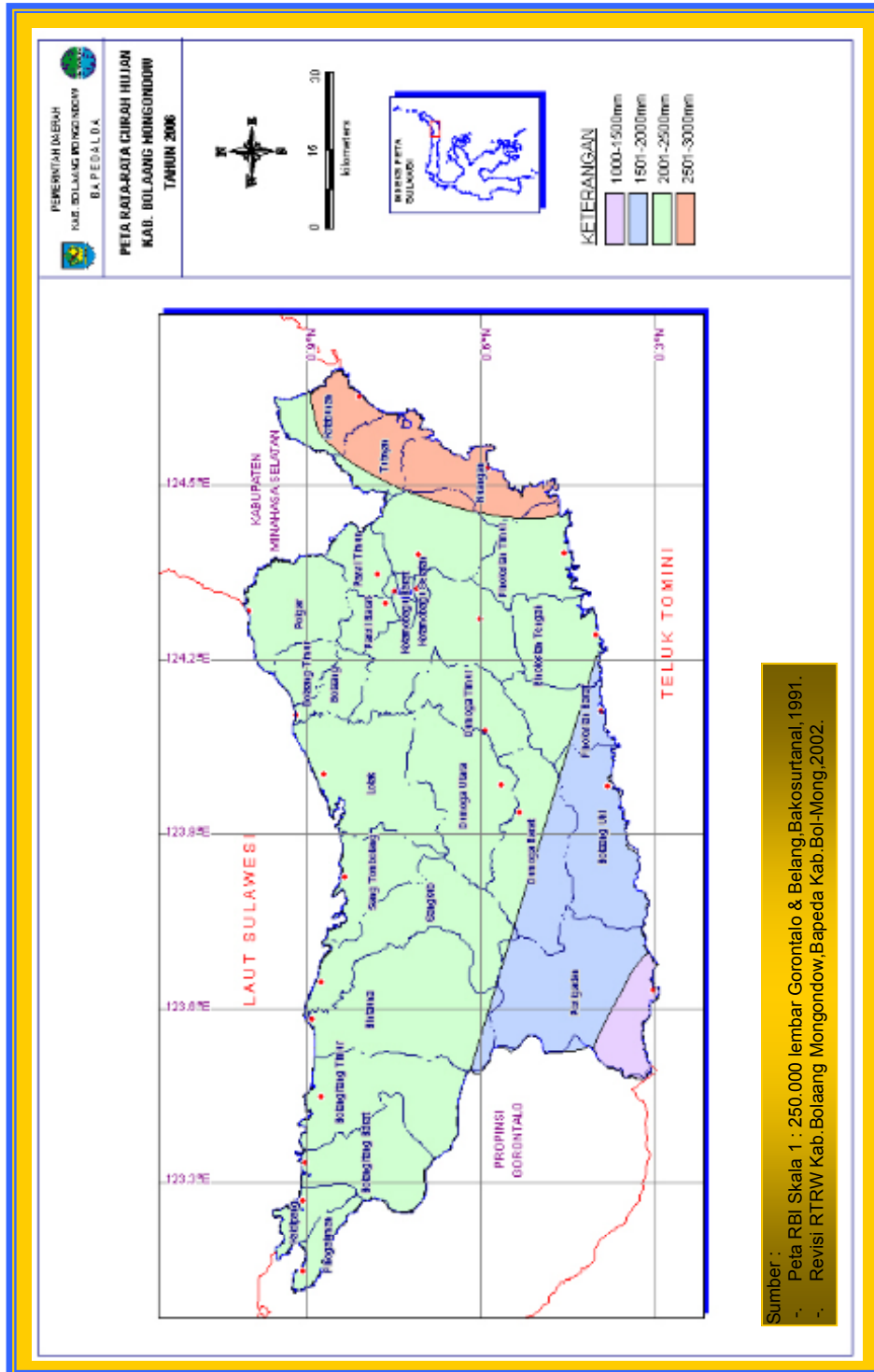


Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2007.BPS.2007

Pada kawasan-kawasan dengan curah hujan rendah, maka akan terjadi defisit air sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Upaya yang perlu dilakukan pada kawasan dengan curah hujan seperti itu adalah pengelolaan air hujan dalam wujud reservoir atau retarding system guna memenuhi kebutuhan air pada musim kering/kemarau, baik untuk keperluan air bersih ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Sebaliknya, pada beberapa kawasan yang memiliki curah hujan tinggi atau sangat tinggi memerlukan pengelolaan, selain dengan sistem tersebut di atas juga diperlukan sistem drainase yang memadai guna mengantisipasi terjadinya genangan atau banjir. Upaya penanggulangan banjir seperti tersebut di atas sedapat mungkin diterapkan pada kawasan yang selama ini rawan banjir seperti di Daerah Bolang Itang dan Dumoga.

Berdasarkan analisis terhadap penyebaran curah hujan bulanan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka potensi air tanah dengan peluang curah hujan 75% pada Kecamatan-kecamatan dengan curah hujan tinggi, masih memungkinkan terpenuhinya kebutuhan tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Pada daerah Kecamatan dengan curah hujan sedang memiliki tipe iklim C-D (Schmidt and Ferguson) atau tipe iklim C2-D1 (Oldeman), yaitu memungkinkan satu kali padi dan satu kali palawija dengan ditunjang oleh sistem irigasi. Sedangkan, pada wilayah dengan curah hujan tinggi memiliki tipe iklim A-C (Schmidt-Ferguson) atau tipe iklim B2-C1 (Oldeman) yang memungkinkan untuk dua kali padi dan satu kali palawija atau satu kali padi dan dua kali palawija dengan ditunjang oleh sistem irigasi yang memadai.

Gambar.3.10. Peta Rata - rata Curah Hujan Kab.Bolaang Mongondow Tahun 2006



3.2. Potensi Air Permukaan

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 18 sungai. Sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87 Km dan yang terpendek adalah sungai Salongo yang panjangnya 9,1 Km. Keberadaan sungai-sungai ini sangat bermanfaat bagi sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga sektor ini tetap merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Bolaang Mongondow. Selain sungai, terdapat 8 buah danau, yang terluas adalah Danau Moat yang luasnya mencapai 617 Ha dan yang terkecil adalah Danau Tondok seluas 10 Ha.



Jika dikaitkan dengan aktivitas pembalakan liar dan penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan termasuk pada badan-badan sungai di bagian hulu dan hilir seperti yang terjadi selama ini, maka dapat dikemukakan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) telah mengalami kerusakan. Realitas ini mengindikasikan bahwa wilayah Bolaang Mongondow sangat potensial terjadi banjir.

Pada daerah - daerah yang memiliki curah hujan tahunan relatif tinggi hingga sangat tinggi, sangat memungkinkan terjadinya aliran permukaan (run off) yang tinggi pula. Jika asumsi kapasitas tanah menyerap air rata-rata sekitar 40% dari potensi jenuh (sekitar 1.000 mm), maka kapasitas tampung tanah terhadap air hanya sekitar 2.000 mm. Dengan demikian, potensi aliran permukaan masih cukup besar terutama pada Bulan Oktober hingga Bulan Juni.

3.3. Kualitas Air

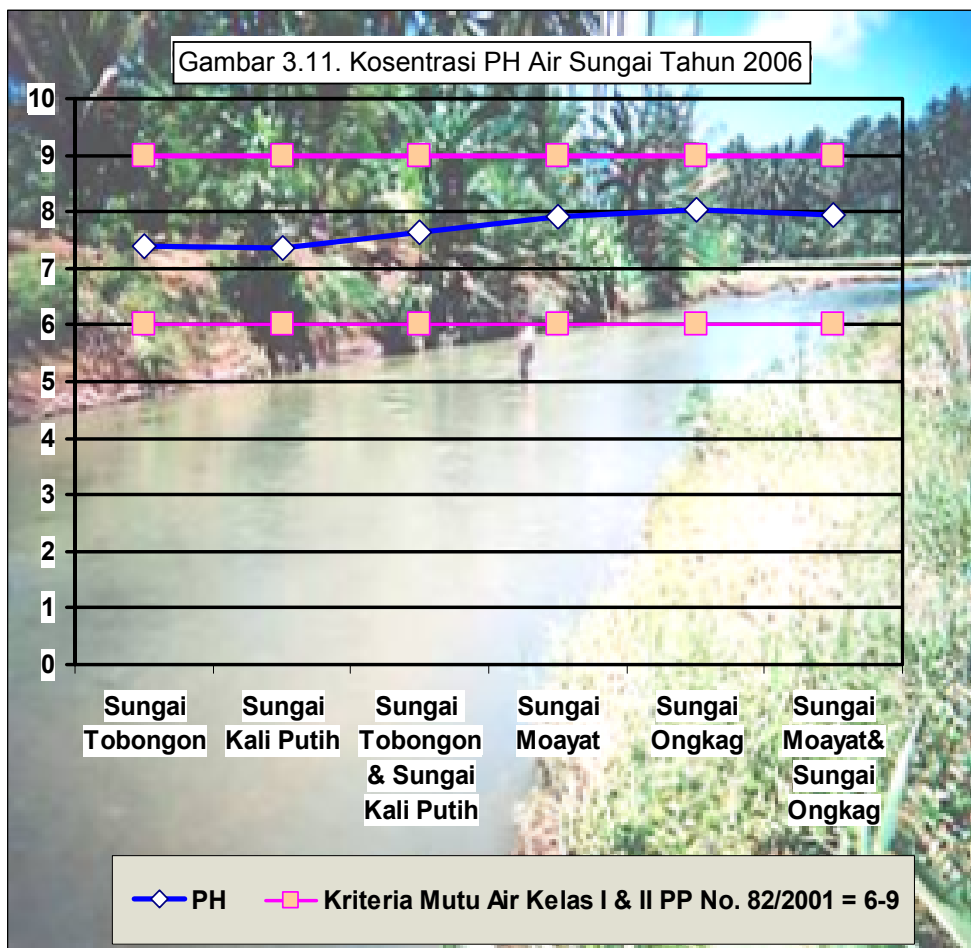
Kualitas air sungai di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dipengaruhi oleh limbah domestik, industri, pertanian, penambangan emas dan peternakan. Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BAPEDALDA Kabupaten Bolaang Mongondow bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL-PPM) Manado.

3.3.1. Parameter pH

Untuk parameter pH, memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II (pH 6-9).

- Kelas I, yaitu air yang dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, budi daya ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

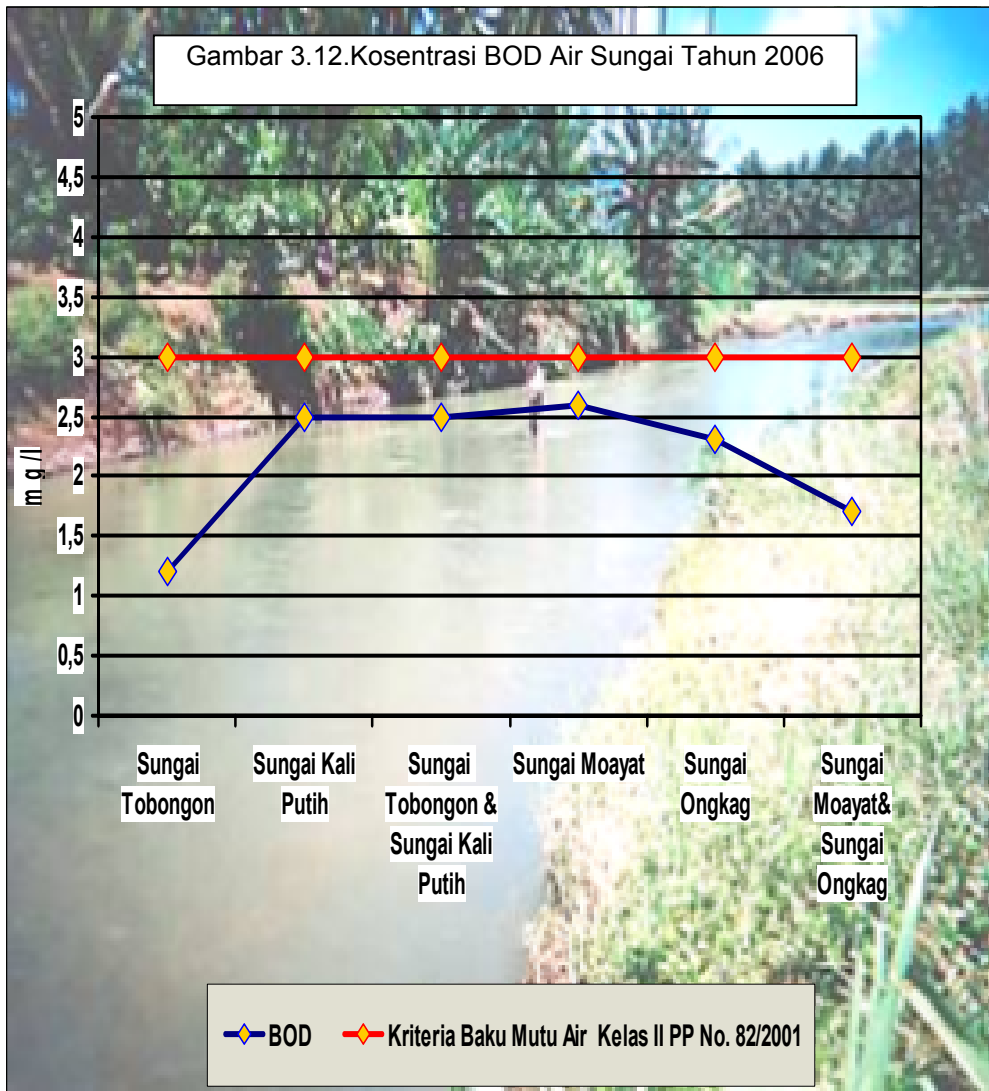
Konsentrasi pH yang terukur di air sungai dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

3.3.2. Parameter BOD

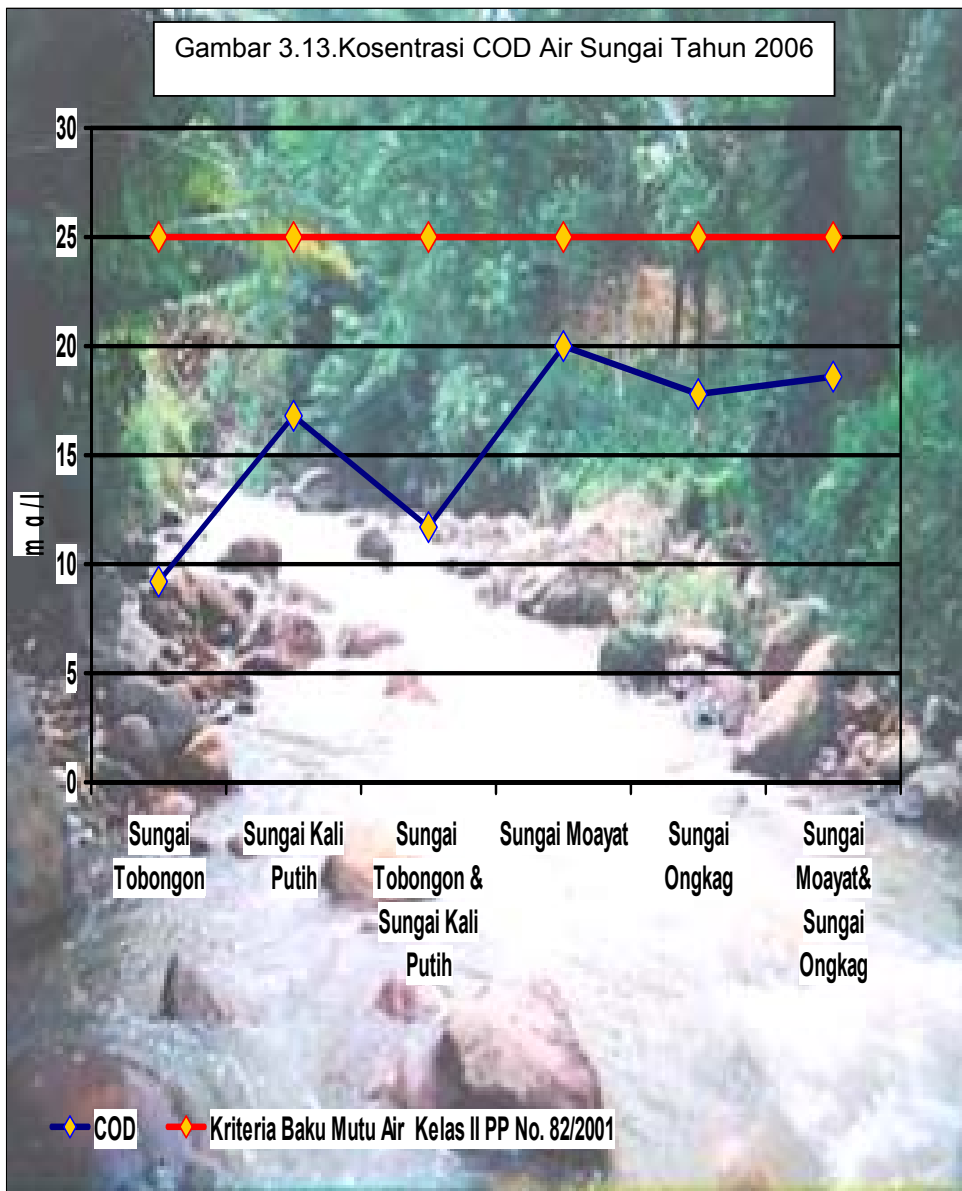
Konsentrasi BOD yang dipantau umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II. Konsentrasi BOD tertinggi terukur di Sungai Moayat (2.6 mg/l), Konsentrasi BOD yang terukur di air sungai dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

3.3.3. Parameter COD

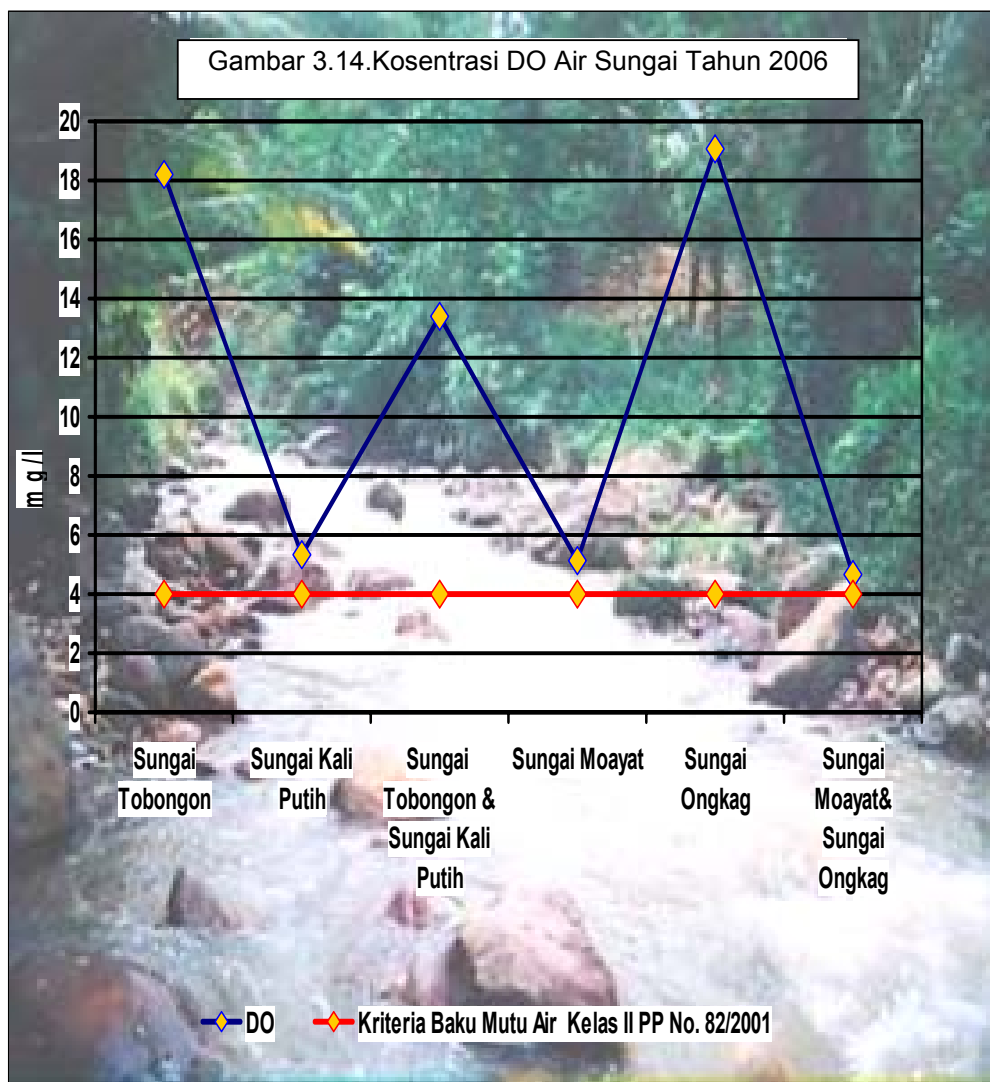
Untuk parameter COD, pada umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II. Kosentrasi COD yang tertinggi hanya 20 mg/l, di titik sampling Sungai Moayat.



Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

3.3.4. Parameter DO

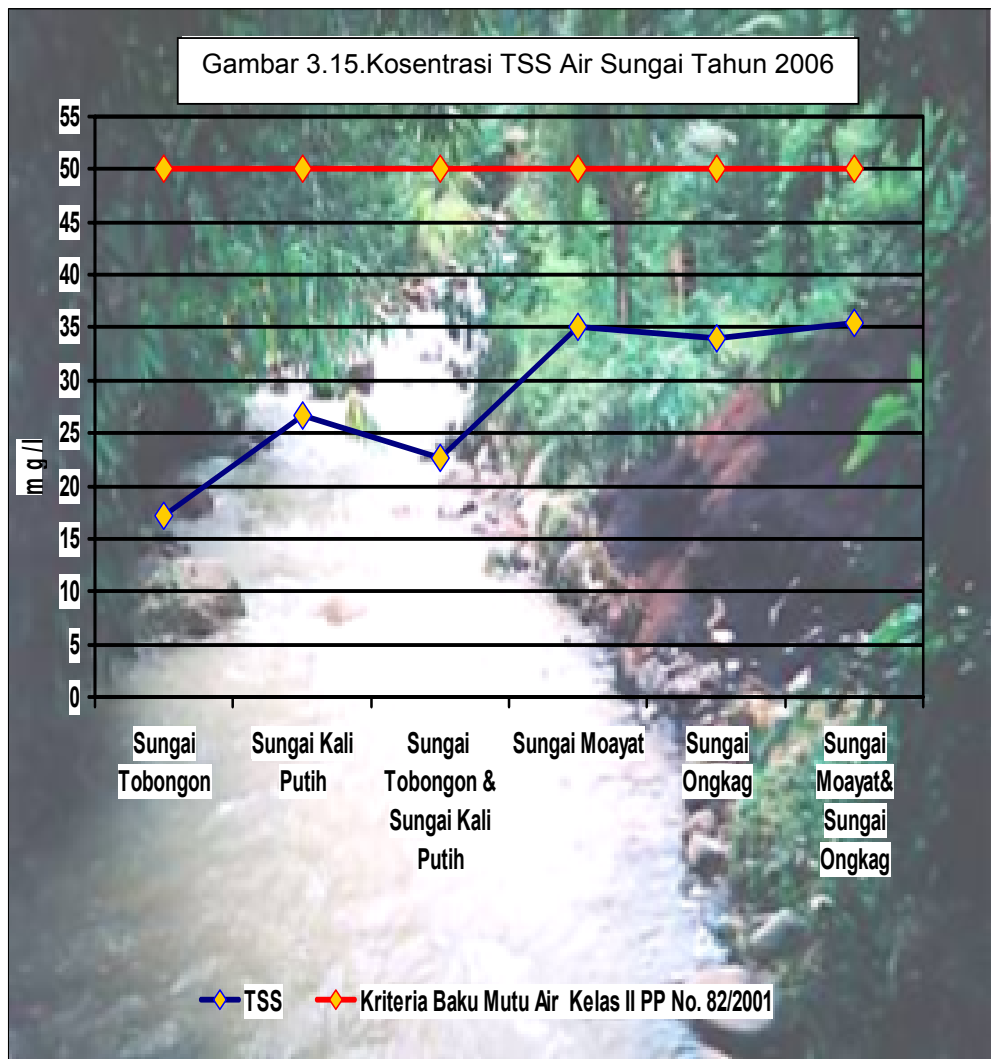
Parameter DO yang di pantau pada umumnya tidak memenuhi kriteria mutu air kelas. Kosentrasi DO yang tertinggi di sungai Ongkag (19,05 mg/l) .Konsentrasi DO di dalam air sungai pada tahun 2006 dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

3.3.4. Parameter TSS

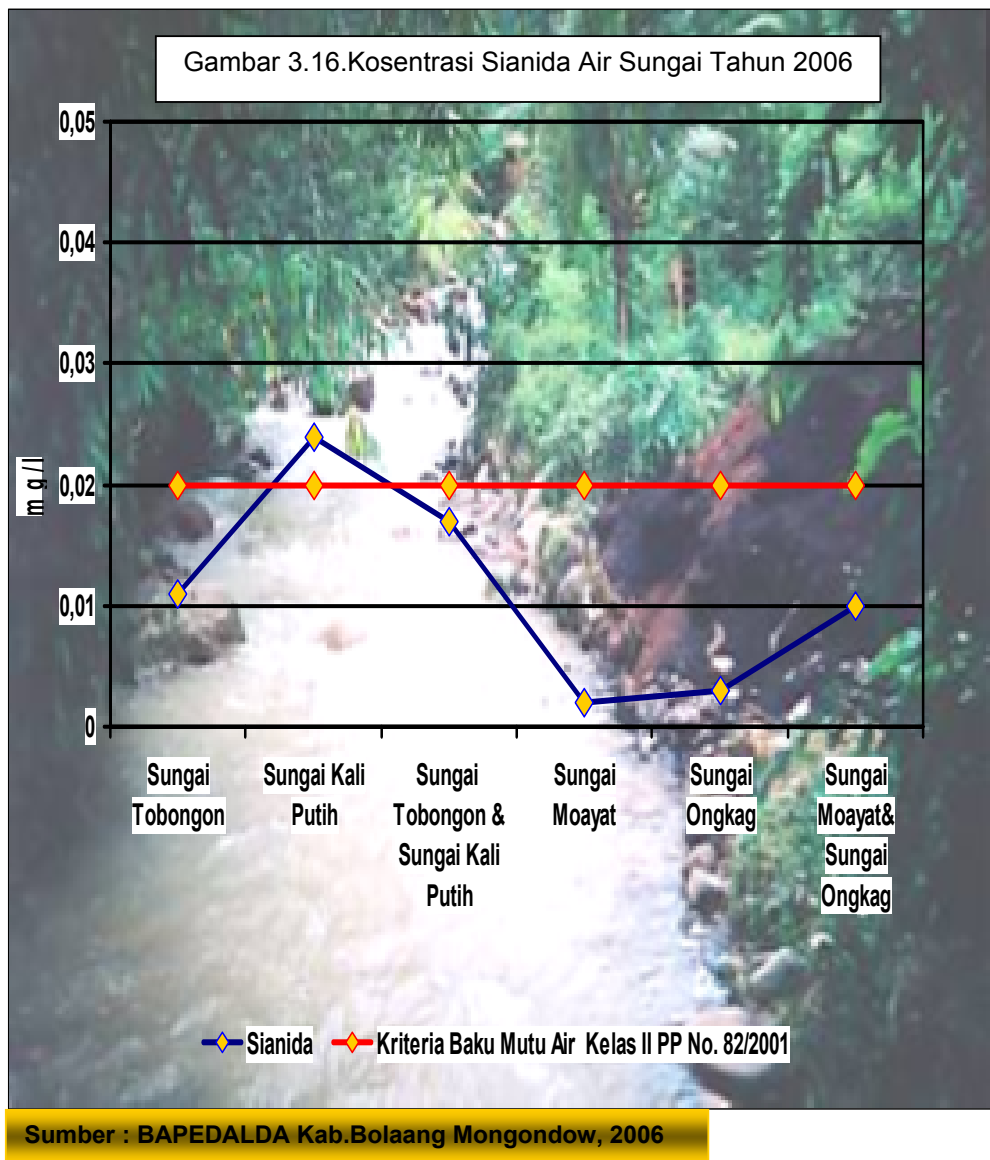
Parameter TSS pada umumnya memenuhi kriteria mutu air kelas II. Konsentrasi TSS di dalam air sungai pada tahun 2006 dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

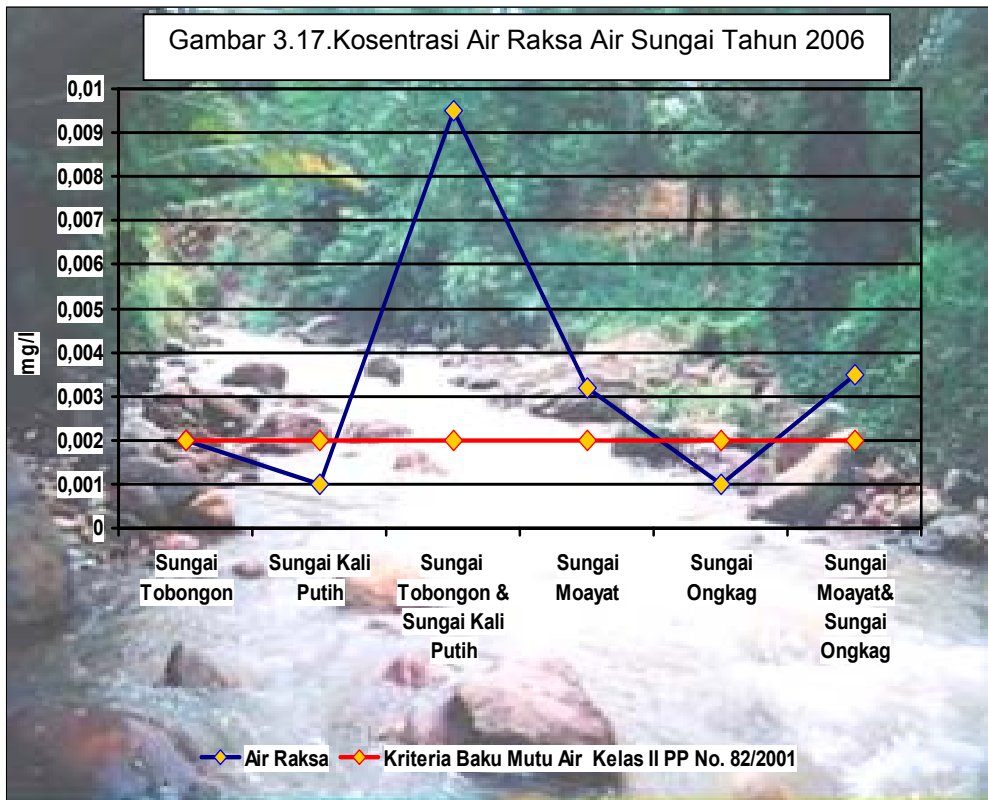
3.3.5. Parameter Siannida

Kosentrasi Sianida yang melebihi baku mutu Air Kelas II di Sungai Kali Putih dan kosentrasi Sianida yang terendah di Sungai Moayat. Kosentrasi Sianida di dalam air sungai pada tahun 2006 dapat dilihat pada Gambar 3.14.



3.3.5. Parameter Air Raksa

Konsentrasi Air Raksa yang dipantau 50% melebihi baku mutu air kelas II. Konsentrasi air raksa yang tertinggi 0,0095 mg/l di Sungai Tobongon & Sungai Kali Putih dan yang terendah 0.001% di sungai Kali Putih & Sungai Ongkag. Konsentrasi Air Raksa di dalam air sungai pada tahun 2006 dapat dilihat pada Gambar 3.15.



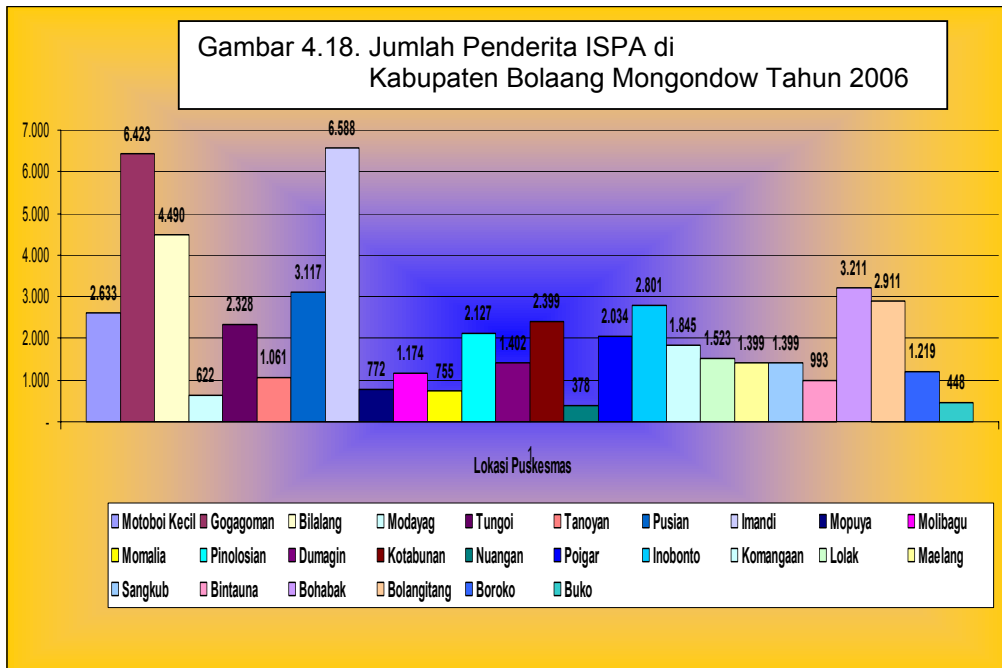
Sumber : BAPEDALDA Kab.Bolaang Mongondow, 2006

BAB IV UDARA

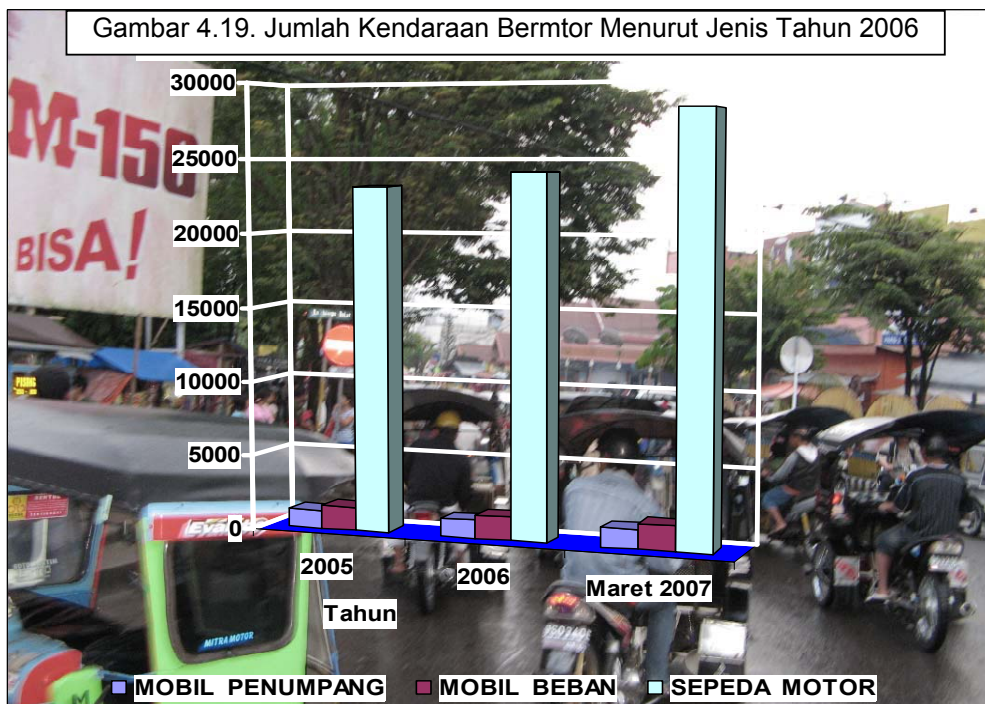
Pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar, sudah merupakan masalah yang perlu segera ditanggulangi. Hal ini akibat dari peningkatan aktivitas manusia, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambahan industri dan sarana transportasi. Kegiatan skala kecil yang dilakukan perorangan juga menyebabkan pencemaran udara, seperti pembakaran sampah, rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Di samping itu, asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga ikut memberikan andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat lokal, nasional, dan regional ASEAN.

Kualitas udara di Kabupaten Bolaang Mongondow yang masih berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan aktivitas industri (industri teraglomerasi di dalam suatu lokasi yang berwujud kawasan industri. Berdasarkan hasil analisis kualitas udara, diperoleh gambaran bahwa tidak terdapat hubungan yang erat antara peningkatan jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan bagian Atas (ISPA) dengan kualitas udara di Kabupaten Bolaang Mongondow. Peningkatan penderita penyakit ISPA disebabkan oleh adanya faktor perubahan iklim yang cukup ekstrim dan lemahnya sistem kekebalan tubuh sebagian penduduk. Sumber pencemar lain yang berpotensi menurunkan kualitas udara adalah gas buang yang berasal dari aktivitas mesin kendaraan dan ternyata polutan tersebut belum mencemari udara Kabupaten Bolaang Mongondow.





Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Bolaang Mongondow, 2006



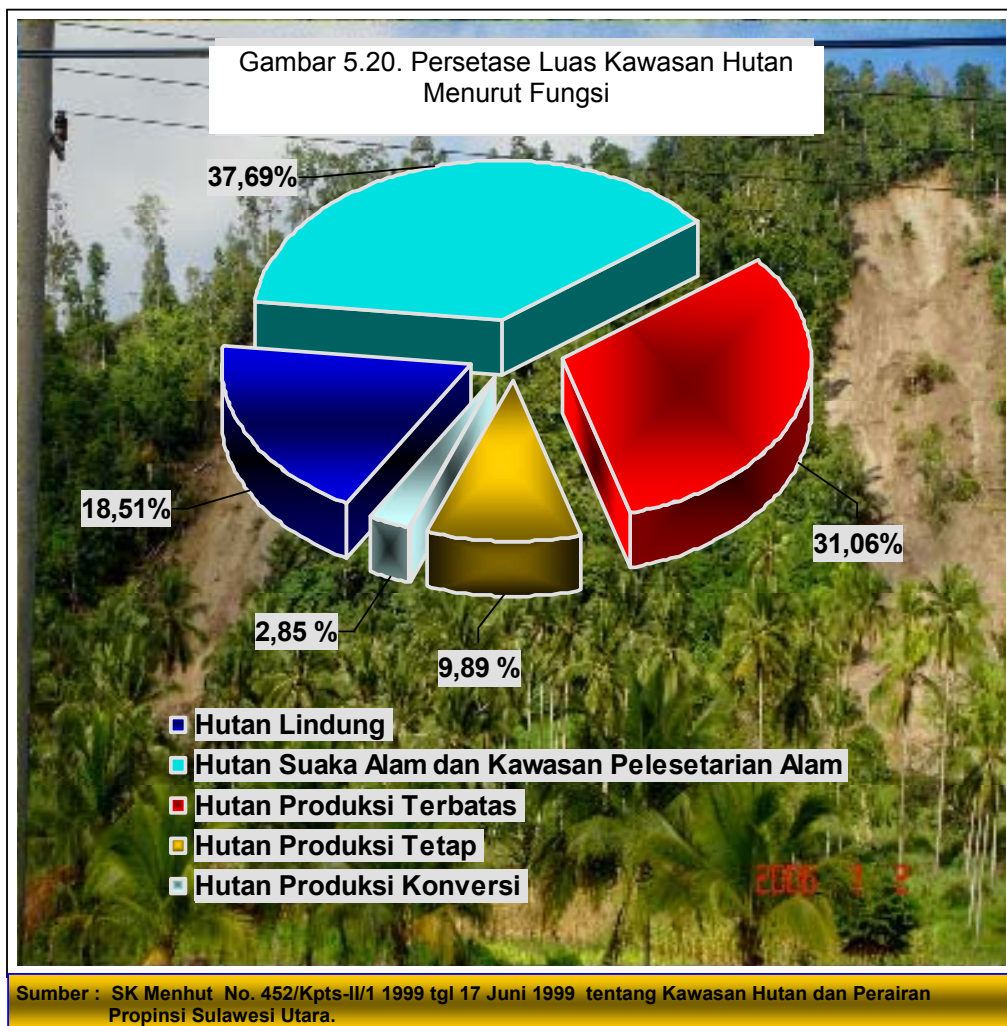
Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka 2007.BPS,2007

BAB V

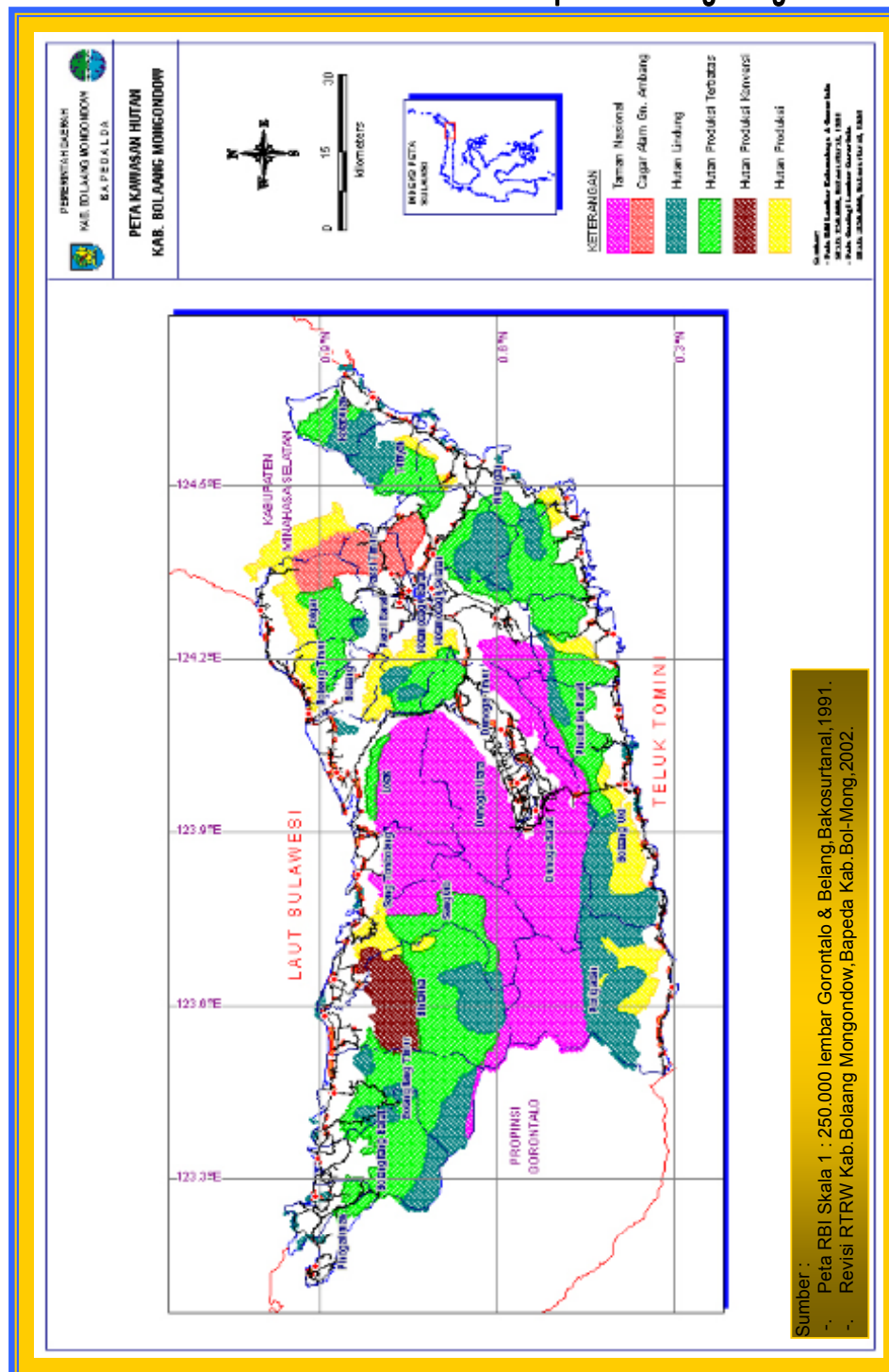
HUTAN DAN LAHAN

5.1. Kondisi Hutan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 513.814,68 ha atau sekitar 61,48% dari total luas wilayah yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 193.646,70 ha, Hutan Lindung seluas 95.088,56 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 159.609,62 ha, Hutan Produksi seluas 50.826,40 ha, Hutan Konversi seluas 14.643,40 ha, yang berdasarkan SK Menhut No. 452/Kpts-II/1 1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Propinsi Sulawesi Utara.

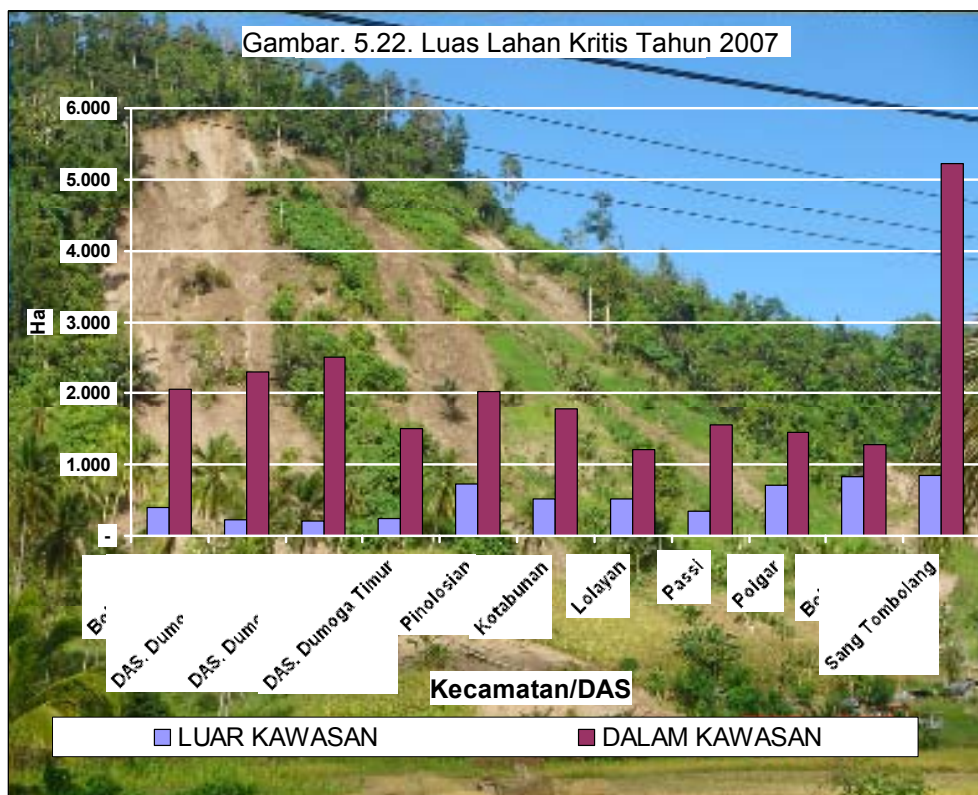


Gambar.5.21.Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow



5.2. Kondisi Lahan .

Luas lahan kritis akibat kerusakan hutan di Kab. Bolaang Mongondow telah mencapai 28.495 ha dengan rincian 22.884 ha di dalam kawasan hutan atau sekitar 80,17 % dan sekitar 5.661 ha atau 19,83 % di luar kawasan hutan.



Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow,2007.

Kerusakan hutan yang terdapat dalam kawasan DAS sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam kasus kerusakan hutan adalah aktivitas perambahan hutan dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Luas lahan kritis yang terdapat DAS Dumoga Timur,Utara dan Barat berjumlah cukup besar,yaitu 6.300 ha di dalam kawasan, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat jumlahnya diduga bertambah setiap tahun.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas Kawasan Hutan 65.15 % dari luas Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Utara, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan aset bangsa yang tak ternilai dan perlu dilestarikan melalui perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan, seperti diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Keanekaragaman Hayati, yang meliputi konservasi, pemanfaatan berkelanjutan atas komponen keanekaragaman hayati, serta akses dan pembagian keuntungan yang adil. Keanekaragaman hayati terdiri dari komponen gen, spesies, dan ekosistem yang merupakan sumber daya dan jasa bagi kehidupan manusia. Kapasitas memanfaatkan dan mengelola keanekaragaman hayati sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai sosial, perbedaan lokasi, implementasi pembangunan wilayah, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Peningkatan laju kerusakan keanekaragaman hayati diakibatkan oleh kesadaran yang kurang akan pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses ekologi dan fungsi ekosistem. Beberapa contoh proses ekologi kunci adalah produktivitas primer, siklus nutrisi, dan kegiatan mikroba.

Selama ini, komponen keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, namun pemanfaatan yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan habitat, kehilangan atau punahnya spesies, dan erosi keanekaragaman genetik. Kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diakibatkan antara lain oleh konversi lahan, invasi spesies asing, dan perubahan iklim dan atmosfer.

Ekosistem hutan memberikan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia, misalnya tanaman obat dan kosmetik yang sampai saat ini masih belum diketahui secara rinci dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ekosistem hutan juga menyediakan jasa lingkungan, seperti pariwisata, sumber air, dan penyerap karbon. Kemampuan ekosistem hutan dalam penyediaan barang dan jasa tersebut tidak terlepas dari komponen dan interaksi antar komponen keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kawasan ekosistem hutan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, tetapi sedang mengalami kerusakan serius adalah Taman Nasional Bogani Nani

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2007

Wartabone (TNBNW). Jumlah flora di dalam TNBNW adalah 172 jenis dan jumlah fauna yang tercatat adalah 20 jenis mamalia, 61 jenis aves, 2 jenis Amphibi dan 11 Jenis Reptil. Fungsi TNBNW sebagai tegak kawasan konservasi akan rusak akibat dari kegiatan perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi, Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kegiatan perambahan hutan, dan pembalakan liar (illegal logging).



BAB VII

REKOMENDASI

Berdasar pada analisis dan telaah isu lingkungan serta hasil kajian evaluasi kebijakan pembangunan daerah, maka diperlukan berbagai rekomendasi sebagai bentuk tidak lanjut untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2007. Rumusan tindak lanjut diuraikan sebagai berikut:

7.1 Penanganan Terhadap Pemanfaatan Lahan

Konsep penataan dan pemanfaatan lahan dengan memasukkan parameter-parameter lingkungan sebagai dasar penentuan kawasan perlindungan/konservasi (non budidaya), kawasan produksi/budidaya, kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan-kawasan dengan tujuan spesifik lainnya. Proses ini dapat diawali dengan perubahan sistem pemetaan sektoral kepada pemetaan dasar pemanfaatan ruang, akurat dan terpadu. Pemetaan dasar kemudian diumumkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk dijadikan acuan pemanfaatan ruang secara tegas dan dipatuhi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama. Penyusunan RTRW Kabupaten hendaknya dilakukan pada unit-unit ekosistem seperti ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem wilayah pesisir dan laut, ekosistem pulau/terumbu karang dan ekosistem kota/industri dan bukan hanya wilayah-wilayah administrasi pemerintahan kabupaten seperti kecamatan sampai kepada kelurahan/desa, sehingga fungsi dan penyusunan RTRW dapat dilakukan secara integratif khususnya pada wilayah ekosistem lintas kabupaten dapat dilakukan dengan baik dan tetap pada landasan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

7.2. Pemantauan Terhadap Daerah Rawan Banjir

Perlunya pemerintah dan stakeholder mengalokasikan dana untuk pembangunan saluran pengendali banjir yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar instansi yang terkait secara terintegrasi.

7.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu review terhadap letak dan luas kawasan hutan pada setiap ekosistem DAS di Kabupaten Bolaang Mongondow.. Pedoman dan tata cara penentuan kawasan hutan lindung dan pedoman dan tata cara penentuan kawasan hutan produksi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan telah beberapa kali disempurnakan baik dalam bentuk Surat Keputusan Bersama beberapa menteri maupun dalam bentuk Keppres dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya, sedangkan rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan dan lahan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien agar fungsi sumberdaya hutan dan lahan serta perannya sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat.

7.4. Supremasi hukum

Dalam pasal 6 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Sosialisasi hukum harus diikuti dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi, yaitu sanksi administratif yang meliputi: pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan, penangguhan berlakunya izin dan bahkan pencabutan izin. Sanksi perdata diberikan karena pencemar atau perusak yang telah mencemarkan atau merusak lingkungan sehingga lingkungan harus dipulihkan kembali. Sanksi pidana dikenakan sesuai dengan pertimbangan penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) setelah melalui tahapan pemberian sanksi administratif dan sanksi perdata (sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997).

7.5. Pengendalian Tekanan Penduduk terhadap Lahan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di sejumlah desa/kelurahan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi variabel penentu tingginya tingkat tekanan penduduk terhadap lahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan penduduk tersebut antara lain adalah merubah luas lahan minimal untuk hidup layak dengan memberikan masukan teknologi usahatani, konservasi tanah serta usaha-usaha penyelesaian

masalah kependudukan berupa penekanan laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk

7.6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungannya. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang baik dan holistik antara masyarakat, pemerintah maupun swasta. Upaya itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya pembudayaan sikap malu membuang sampah di sungai atau membakar sampah yang dapat menyebabkan pencemaran udara, memelopori gerakan green consumerism untuk menolak konsumsi produk yang mencemari lingkungan, menggalang gerakan menanam pohon pada bantaran-bantaran sungai atau lomba kebersihan lingkungan mulai dari tingkat desa/kelurahan.

7.7. Pelayanan kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Untuk merelalisasikan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow senantiasa berusaha untuk menambah dan menyempurnakan sarana dan prasarana kesehatan yang ada, termasuk peralatan dan tenaga medis, agar seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau dan menikmati fasilitas kesehatan dengan peningkatan kualitas terhadap kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan menyangkut sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga harus diperbaiki dengan cara memperbanyak sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), apotik, klinik kesehatan, balai pengobatan, termasuk tenaga-tenaga pamamedis dan dukun terlatih.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- BPS 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Fandeli, C. 1995. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemahamannya dalam Pembangunan. Liberty, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dr.Ir.Suripin,M.Eng.2001. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, Andi Yogyakarta
- A.Tresna Sastrawijaya,MSc.2000. Pencemaran Lingkungan,Rineke Cipta,Jakarta.
- Pedoman Umum Penyusunan Laporan dan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah 2007,Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, 2002. Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- _____, Sumber data. Dinas, Badan dan Instansi Terkait di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow